

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

**ANALISIS TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN
PADA MASYARAKAT TEBING TINGGI**

Yani Afdillah
Isnaini Harahap
Marliyah



ANALISIS TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN PADA MASYARAKAT TEBING TINGGI

Yani Afdillah
Isnaini Harahap
Marliyah

Desain Cover : Bayu Nugroho
Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp./HP. 0813 6116 8084
Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2015
ISBN : 978-602-6903-01-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

Kata Pengantar

Segala puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Tebing Tinggi”. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah menyampaikan risalah rahmat kepada seluruh alam.

Buku yang ada di tangan pembaca ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada:

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang membantu terbitnya penelitian ini.
2. Para guru dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya pada penulis, sehingga penulis dapat berkiprah membangun bangsa.
3. Teman-teman penulis yang memiliki semangat juang dan ide yang sama untuk memajukan ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, penulis mengharapkan masukan guna perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat...

Medan, 12 Nopember 2015

Dilla, Neni, dan Imar

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teoritis	13
B. Pertumbuhan Ekonomi	40
C. Teori Kemiskinan	45
D. Distribusi Pendapatan.....	59
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	63
F. Kerangka Pemikiran.....	64
G. Hipotesis	65

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Metode Pengumpulan Data	67
D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Definisi Operasional	68
F. Metode Analisis.....	68

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum	71
B. Hasil Penelitian, Pembahasan dan Analisis peneliti	80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan simbol kemakmuran dan kemajuan negara dan menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, setiap kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat diukur dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh dari seluruh aspek kesejahteraan yaitu aspek ketenagakerjaan, kemiskinan dan kualitas hidup (Indeks Pembangunan Manusia). Namun sangat sulit untuk menggambarkan kesejahteraan yang dicapai suatu negara, sehingga ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.¹

Idealnya kesejahteraan ekonomi dicapai ketika pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan perkapita masyarakat tinggi dan terdistribusi secara merata. Secara normative, pendapatan nasional yang sempurna adalah ketika setiap orang menerima pendapatan yang sama besarnya. Namun pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai standar kesejahteraan masyarakat sangat bias dan memiliki banyak kelemahan, bahkan pendapatan perkapita yang merupakan cermin pendapatan rata-rata masyarakat tidak mencerminkan

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 423.

pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya dan meratanya distribusi pendapatan tersebut.²

Selain pertumbuhan ekonomi, tolak ukur keberhasilan pembangunan juga dilihat dari struktur ekonomi dan kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan juga antar sektor. Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi (QS al-Hasyr 7)

مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِیَتْمَىٰ وَلِلسَّكِينِ
وَبِئْسَ لِسَبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ لَأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَتَّقُوا لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ شَدِيدَ لِعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

Distribusi yang tidak merata menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, bukan karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehinggamenyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan.³ Banyak negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskin.

² N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* ,(Jakarta:Erlangga), h. 72

³ Ulasan rinci tentang pandangan-pandangan ekonom di atas, lihat Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 17-23

Tahun 2010 misalnya, FAO menyatakan bahwa 98 persen atau 906,5 juta penduduk di negara berkembang kekurangan pangan. Dari jumlah tersebut, dua pertiga berada di tujuh negara yaitu: Bangladesh, China, Republik Demokratik Kongo, Etiopia, India, Pakistan, dan Indonesia. Di sisi lain, di tengah situasi rawan pangan, FAO melaporkan ada 1,3 miliar ton makanan terbuang percuma, dimana jumlah pangan terbuang oleh konsumen di Eropa dan Amerika sangat besar, mencapai 95-115 kg per kapita per tahun. Besarnya jumlah pangan yang terbuang di negara maju menunjukkan suatu ketimpangan, karena sebagian besar pangan yang diproduksi di negara berkembang dibuang-buang di negara maju, padahal, produksi pangan petani kecil negara berkembang mampu memberi makan lebih dari 70 persen populasi dunia.⁴

Selain kekurangan pangan, jurang kemiskinan antara negara-negara di dunia juga sangat melebar. Menurut UNDP, diperkirakan 1 di antara 5 orang berpendapatan kurang dari USD 1,25 (sekitar Rp 15.000) per hari, dan 1,2 miliar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan yang sangat ekstrem.⁵ Munculnya kemiskinan bukan karena tidak adanya sumber kemakmuran. Namun, sumber kemakmuran tersebut lebih banyak dikuasai sekelompok tertentu. Akses orang miskin terhadap sumber kemakmuran tersebut sangat rendah dan lemah. Contohnya, Oxfam melaporkan, harta 85 orang terkaya setara dengan kekayaan milik setengah populasi di dunia. Dengan kata lain, 1 persen orang terkaya di dunia menguasai harta yang setara dengan milik setengah populasi manusia di muka bumi ini.⁶ Konsentrasi sumber daya ekonomi di tangan sedikit orang tersebut merupakan ancaman bagi sistem politik dan ekonomi dunia dan potensial untuk meningkatkan ketegangan sosial dan resiko social

⁴ Food And Agriculture Organization Of The United Nations. *The State of Food Insecurity in the World: Addressing Food Insecurity in Protracted Crises*, Rome 2010

⁵ UNDP, *Human Development Report, 2014*. dapat diunduh di <http://www.mr.undp.org>

⁶ Oxfam. *Working For The Few Political Capture and Economic Inequality* dalam <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-en.pdf>

Selain kemiskinan, lebarnya tingkat ketimpangan pendapatan, ekonomi juga menyebabkan terjadinya eksploitasi negara maju terhadap sumber daya alam negara berkembang. Sebagai contoh, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke 6 sebagai negara produsen cadangan emas terbesar di dunia, peringkat 5 dalam produksi tembaga dan bauksit, penghasil timah terbesar kedua setelah China dan produsen, produsen nikel terbesar kedua di dunia, eksportir batubara kedua di dunia setelah Australia, eksportir gas alam bersih (LNG) terbesar di dunia dan eksportir ketiga terbesar gas alam cair setelah Qatar dan Malaysia. Cadangan minyak Indonesia juga berlimpah, Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas, bahkan penguasaan minyak bumi di Indonesia hampir 90% dikuasai asing.⁷ Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah mengapa bisa terjadi kemiskinan? Padahal untuk kasus Indonesia, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga dari sumber daya alam saja, negara akan memperoleh pendapatan yang cukup besar. Untuk menjawab pertanyaan ini

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran keberhasilan perekonomian salah satunya diukur melalui Pendapatan Domestic Bruto (PDB) atau PDRB untuk perekonomian daerah baik atas dasar konstan maupun atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi PDRB maka semakin sejahteralah masyarakat. Namun tentu saja kesejahteraan yang dimaksud hanya tercapai jika PDRB yang besar tersebut dinikmati oleh semua anggota masyarakat dan bukan hanya segelintir orang atau kelompok. Kotamadya Tebing Tinggi misalnya, kinerja ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2008 – 2010 yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2008 pendapatan tebing tinggi mencapai Rp. 1,823 triliun rupiah tahun 2008, dan angka ini meningkat menjadi Rp. 2,033 triliun rupiah dan pada tahun 2010 kinerja ekonomi Kota Tebing Tinggi mencapai nilai Rp. 2,295 triliun rupiah. Kinerja ekonomi Kota Tebing

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/12/12/13/i>

Tinggi secara riil yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan setiap tahun. Kinerja ekonomi secara riil pada tahun 2010 mencapai Rp. 1,17 triliun rupiah. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp. 1,10 triliun rupiah maupun dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp. 1,04 triliun rupiah.⁸

Tabel 1
PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 – 2010

PDRB	2008	2009	2010
[1]	[2]	[3]	[4]
Atas Dasar Harga Berlaku	1.823.672,20	2.032.877,02	2.291.563,04
Atas Dasar Harga Konstan	1.037.465,11	1.099.238,84	1.174.221,87

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi ini dikenal sebagai wilayah yang mengandalkan industri dan perdagangan. Sebagai penyumbang kegiatan ekonomi terbesar, sektor industri tidak bisa mengenyampingkan keberadaan industri-industri kecil dan rumahan yang tersebar di tiga kecamatan. Kedua jenis industri ini yang digolongkan sebagai UKM dan hingga tahun 2010 mencapai 263 unit dari total 289 perusahaan, mendukung sektor industri pada umumnya. Besarnya ketergantungan pada industri dan perdagangan terlihat dari nilai kegiatan ekonomi daerah setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,31 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan

⁸ Wikipedia Indonesia. Kota Tebing Tinggi.com

penggunaan kereta api, angkutan jalan raya berupa mopen dan becak sebagai alat angkut barang dan penumpang. Becak sudah banyak karena kendaraan roda dua yang dapat di modifikasikan menjadi becak. Angkutan kereta api juga meningkat dengan adanya kereta api Sri Lelawangsa. Kondisi yang menyebabkan peningkatan sub sektor komunikasi adalah semakin banyaknya penggunaan telepon seluler karena harga yang semakin terjangkau serta lebih efisien dalam penggunaannya.

Lapangan lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah perdagangan, hotel dan restoran (6,81 persen); bangunan (6,11 persen); Industri pengolahan (5,78 persen), jasa-jasa (5,46 persen); dan listrik, gas dan air bersih (5,30 persen). Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya kurang dari 5 persen, yaitu pertambangan (4,71 persen), persewaan dan jasa perusahaan (4,49 persen); dan pertanian (1,55 persen). Seperti pada table:

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 – 2010
(persen)

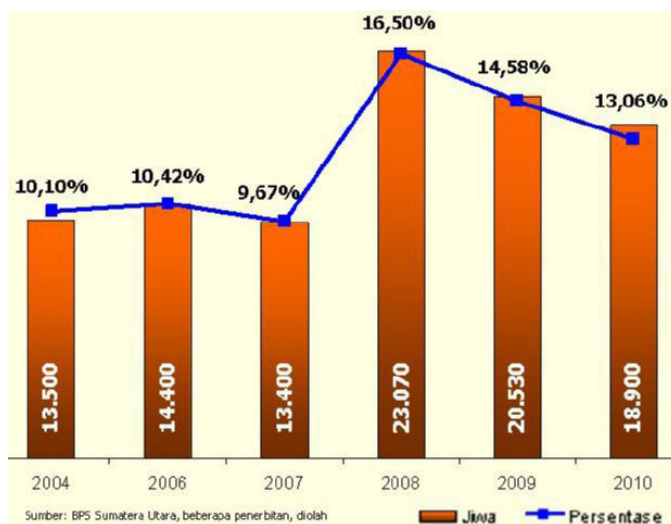
Lapangan Usaha	2008	2009	2010
[1]	[2]	[4]	[4]
1. Pertanian	0,58	2,36	1,55
2. Pertambangan	4,44	5,12	4,71
3. Industri pengolahan	4,83	4,51	5,78
4. Listrik, Gas dan air Bersih	3,46	3,60	5,30
5. Bangunan	7,34	7,40	6,11
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,28	6,14	6,81
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,52	6,71	7,31

8. Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan	6,92	5,95	4,49
9. Jasa-Jasa	3,64	5,89	5,46
PDRB	5,98	5,95	6,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Pada tahun 2010, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 7,31 persen. Pembangunan di Tebing Tinggi yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah ini, namun disisi lain kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik ditingkat provinsi maupun di daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Tetapi yang mungkin harus digaribawahi adalah bahwa konsep kesejahteraan relatif luas, sehingga penurunan angka kemiskinan tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan. Angka kemiskinan hanya proksi untuk menilai peningkatan kesejahteraan rakyat. Data di bawah menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi sudah relatif menurun. Bila di tahun 2009 jumlahnya sekitar 14,58% (20.530 jiwa), di tahun 2010 jumlahnya sudah menurun menjadi 13,06% atau 18.900 jiwa, dan 2011 (12,44%). Namun jika penurunan angka kemiskinan berjalan normal seperti diatas dikhawatirkan tidak akan mencapai target nasional yaitu (8-10%).



Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi. Sumber: sumut.bps.go.id

Untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, pemerintah Kota Tabing Tinggi juga seyogianya memperhatikan distribusi pembangunan maupun PDRB ke seluruh kecamatan yang ada di Tebing Tinggi, serta membangun infrastruktur yang mendukung investasi di wilayah Tebing Tinggi, sebab investor hanya ingin menanamkan modalnya pada daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya karena akan mempermudah usahanya. Dengan demikian daerah yang belum terjangkau fasilitas tersebut kemungkinan besar akan mengalami ketertinggalan sehingga menyebabkan kesenjangan antar daerah. Adalah sebuah kenyataan, bahwa perekonomian ekonomi di Tebing Tinggi bisa tumbuh dengan cepat seiring dengan perkembangan fasilitas yang ada k fasilitas ekonomi seperti sektor industri, serta fasilitas pendukung lainnya. Pada umnya sektor industri besar/ sedang di Kota Tebing Tinggi lokasi usaha paling banyak justru di Kecamatan Bajenis.⁹ Kondisi ini jika tidak ditata ulang akan menyebabkan kepadatan penduduk pada wilayah tersebut, sehingga bisa menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru.

⁹ Lihat S Dalimunthe. *Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Tebing Tinggi* dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18232/5/Chapter%20I.pdf

Data yang ada menunjukkan, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat di Indonesia, ternyata ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini juga meningkat, tetapi kemiskinan cenderung menurun. Dengan kata lain, makin tinggi pertumbuhan, memang jumlah dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, tetapi ketimpangan antara si kaya dan si miskin cenderung kian lebar saat pertumbuhan semakin meningkat di Indonesia selama periode 2002-2011.¹⁰ Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah dalam pencapaian tingkat perekonomian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis berusaha untuk membahas masalah ini dengan berjudul **“Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada masyarakat Tebing Tinggi”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah merupakan sebuah perbedaan yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Kesenjangan ekonomi antara penduduk sudah cukup memprihatinkan dan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Sedikitnya kesempatan kerja di daerah yang mengakibatkan banyaknya masyarakat daerah bekerja ke kota
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun
3. Banyaknya investor yang ingin menanamkan dana dan melakukan investasi di Tebing Tinggi
4. Terdapatnya pengaruh perbedaan pendapatan antara masyarakat terhadap tingkat kesenjangan.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro. *Mengurangi Kemiskinan*. <http://publications.feb.ugm.ac.id/node/30>

C. BATASAN MASALAH

Luasnya permasalahan kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan di atas akan menyebabkan pembahasan menjadi tidak focus. Oleh karena itu permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada kesenjangan distribusi pendapatan pada masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas maka penulis masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besar kesenjangan pendapatan di Tebing Tinggi?
2. Apakah tingkat kesenjangan tersebut masih dalam taraf normal?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *untuk melihat secara mendalam bagaimana tingkat kesenjangan pendapatan pada masyarakat di Tebing Tinggi*

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Menambah masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam merencanakan pembangunan selanjutnya antar kabupaten/kota Sumatera Utara, terutama yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan, pemerataan pendapatan di daerahnya.
2. Sebagai bahan dan tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata 1 pada jurusan Ekonomi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
3. Memberikan sumbangan informasi bagi penelitian serupa mengenai tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan antar

kabupaten/kota di Sumatera Utara khususnya Kota Tebing Tinggi serta menambah pembendaharaan studi bagi program studi ekonomi Islam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah dari kesenjangan pendapatan di Tebing Tinggi, rumusan masalah, Batasan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis berisi teori-teori yang berhubungan dengan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, Gap Analisis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data serta metode analisis.

Bab IV hasil dan pembahasan berisi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Pendapatan Nasional

Secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang di hasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Secara umum istilah pendapatan nasional selalu disebut dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GNP). Menurut Mankiw, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.¹¹ PDB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang biasanya pertahun. Adapun sektor-sektor ekonomi tersebut terdiri dari: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air Minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa.¹²

¹¹ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Jilid 2*, (Jakarta:Erlangga, 2000) h. 126.

¹² Erni Umi Hasanah, Dadang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:CAPS, 2012) h. 19-20.

Logika yang berlaku untuk perekonomian secara keseluruhan, dimana dalam menilai suatu negara tergolong kaya atau miskin, pertama-tama yang dilihat adalah seberapa banyak pendapatan total dari semua orang yang tinggal di negara tersebut.¹³ Produk domestik bruto (PDB) mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian dan pengeluaran total terhadap *output* barang dan jasa perekonomian. PDB nominal menilai barang dan jasa pada harga berlaku. PDB riil menilai barang dan jasa pada harga konstan. PDB riil meningkat hanya jika jumlah barang dan jasa meningkat, sedangkan PDB nominal bisa meningkat karena output naik atau karena harga meningkat. Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan perkiraan PDB secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk menerangkan kerangka kerja hubungan antara variable makro ekonomi, yaitu: output, pendapatan, dan pengeluaran seperti yang terlihat pada gambar *circular flow* berikut:.



¹³ N.Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 124.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa awalnya aliran datang dari rumah tangga menuju perusahaan melalui pasar input untuk menawar berbagai jenis factor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan, dan konsumen akan mendapat balas jasa berupa pendapatan. Perusahaan kemudian dapat memanfaatkan factor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Setelah proses produksi selesai barang dan jasa tersebut dipasarkan untuk dikonsumsi konsumen. Dari konsumsi barang dan jasa, konsumen akan mengeluarkan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Dari gambar ini akan terlihat dua jenis aliran barang dan jasa, yaitu dalam bentuk nilai factor produksi dari rumah tangga ke perusahaan (*input*) dan nilai hasil produksi (*output*) barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga.

Selain istilah PDB atau GDP, istilah lain yang dipergunakan untuk pendapatan nasional adalah PNB (Produk Domestik Bruto) atau GNP (Gross National Product). Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Perbedaan antara PNB dan PDB terletak pada penghitungan kontribusi masyarakat yang ada dalam satu negara. Jika dalam PDB pendapatan yang dihitung adalah pendapatan seluruh masyarakat yang ada di satu negara baik oleh penduduk negara tersebut maupun penduduk yang berasal dari negara lain, maka dalam PNB yang dihitung adalah pendapatan masyarakat satu negara dan pendapatan penduduk negara tersebut di negara lain, yang diperoleh misalnya oleh para tenaga kerja Indonesia di negara asing.

Selain PDB dan PNB, istilah lain untuk pendapatan nasional juga diistilahkan dengan Produk Nasional Netto (PNN) atau Net National Product (NNP) yaitu PNB *dikurangi dengan depresiasi*. Berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari

bagian GNP yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian. Biasanya data GNP lebih banyak digunakan dibandingkan dengan NNP karena estimasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat sedangkan perkiraan GNP tersedia dalam bentuk sementara.¹⁴

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah.

Jika pendapatan nasional tersebut dibagikan kepada masyarakat maka diperoleh Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*). Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*transfer payment*) yaitu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak akan menghasilkan Pendapatan Disposabel. Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk

¹⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2000), h.108

dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.¹⁵

Ringkasan Istilah Pendapatan Nasional

Istilah	Rumus
Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)	$PDB = \text{Barang} + \text{Jasa Beredar}$
Produk Nasional Bruto (Gross National Product)	$PDB = PNB - PFN \text{ dari LN}$ dimana PFN adalah FN dari LN yaitu pendapatan faktor – faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor – faktor produksi yang dibayarkan di luar negeri.
Produk Nasional Bruto (Net National Product)	$NNP = PNB - \text{depresiasi}$
Pendapatan Nasional (National Income)	$PN = PNN - PTL + S,$ dimana PTL (Pajak Tidak Langsung), S (Subsidi).

¹⁵ Ulasan lengkap tentang istilah-istilah pendapatan nasional ini lihat Sadono Sukirno. *Ekonomi Makro* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),

Pendapatan Personal (Personal Income)	$PP = PN - LTB - PAS + PIGK + PNB$ Dimana: LTB = Laba Tidak Dibagikan PAS = Pembayaran Asuransi Sosial PIGK = Pendapatan Bunga yang diterima pemerintah dan konsumen PNB = Pendapatan Nonbalas Jasa
Pendapatan Disposabel (Disposable Income)	$DI = PP - \text{Pajak}$

Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit di capai namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat adalah distribusi pendapatan masyarakat diantara golongan penduduk (golongan pendapatan). Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivita, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan penduduk.

Dalam penghitungan pendapatan nasional, ada tiga cara perhitungan, yaitu metode output (*output approach*), metode pendapatan (*income approach*) dan metode pengeluaran (*expebditure approach*):

- a. Metode Output (*Output Approach*) atau Metode Produksi.

Cara perhitungan dengan praktis adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor. Nilai tambah adalah selisih antara output dengan nilai input

$$.NT = NO - NI.$$

Dimana : I = sektor produksi ke 1,2,3,...,n

Penggunaan konsep nilai tambah dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda (*double accounting*). Perhitungan pendapatan dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada, sektor industri tersebut diklasifikasikan menjadi 11 sektor atas dasar *Internasional Standard Industrial Clasification*. Kemudian, dalam perkembangannya perhitungan dengan pendekatan metode ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 9 sektor yang meliputi sektor produksi (1) pertanian, perternakan dan kehutanan (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan lain, Dan (9) jasa-jasa. Metode produksi dapat dilihat dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \sum NTb_{1-9} \text{ atau } Y = NTb_1 + NTb_2 + NTb_3 + \dots + NTb_9$$

dimana

Y = Pendapatan nasional

NTb = Nilai Tambah

- b. Metode Pendapatan (Income Approach). Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungannya sebagai berikut :

$$Q = f(L, K, T, E)$$

Dimana:

Q : output

L : tenaga kerja

K : barang modal

T : Tanah

E : kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan

Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN)

$$PN : w + I + r + \pi$$

Dimana :

w : upah/gaji

i : pendapatan bunga

r : pendapatan sewa

π : keuntungan

Penghitungan dengan model ini tidak dipergunakan di Indonesia namun dipergunakan di Amerika.

c. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agrerat dalam suatu perekonomian :

- 1) Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*)
- 2) Konsumsi Pemerintah (*Goverrnent Consumption*)
- 3) Pengeluaran Investasi (*Investment Expenditure*)
- 4) Ekspor Neto (*Net Export*)

Nilai PDP berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut :

$$PDB : C + G + I + (X-M)$$

Di mana :

C : konsumsi rumah tangga

G : konsumsi / pengeluaran pemerintah

I : PMTDB

X : ekspor

M : impor

Metode pengeluaran ini memiliki nilai plus bagi perekonomian. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tingkat pendapatan masyarakat.¹⁶ Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pendapatan penduduk tidak selalu merata bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Sebagian ada yang berpenghasilan kecil dan hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan aja, sebaliknya ada yang berpenghasilan besar atau besar sekali sehingga kebutuhan makanan terpenuhi sebagian orang lagi berpenghasilannya berada di antara kedua orang/kelompok tadi. Perbedaan pendapatan tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan umum, lapangan usaha, kesempatan kerja, produktivita masing-masing individu, kewiraswastaan dan lain-lain. Pendapatan perorangan tadi (upah, gaji) dari seluruh wilayah pemerintah (Negara, Propinsi, Kabupaten, kota) dijumlah kemudian ditambah dengan sewa tanah yang digunakan untuk kegiatan uasaha (industri, perdagangan, tempat hiburan dan lain-lain)¹⁷.

Menghitung pendapatan suatu negara bukanlah kerja yang mudah. Dalam perekonomian tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai kegiatan produksi dan nilai barang dan jasa diwujudkan oleh setiap kegiatan ekonomi. Masalah utama yang dihadapi dalam menghitung pendapatan nasional adalah :

- Masalah mengumpulkan data
- Masalah menentukan jenis kegiatan yang produksinya perlu dihitung dalam menghitung menentukan pendapatan nasional.

Walaupun memiliki beberapa kelemahan namun pendapatan nasional sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan

¹⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 184.

¹⁷ <http://DistribusiPendapatanMasyarakat.com>

pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industry pertanian atau negara jasa Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapur termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Di samping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.¹⁸

2. Pendapatan Nasional dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu Negara. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam indikator kesejahteraan adalah dengan penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam sistem arti sebuah system ekonomi merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya.¹⁹

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip

¹⁸ Wikipedia.org

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 195

pokok dalam islam (zakat). Sedangkan sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah Saw, tidaklah terbatas pada zakat semata, karena zakat sendiri baru diperkenalkan pada tahun ke 8 Hijriah. Di zaman Rasulullah Saw, sisi penerimaan APBN terdiri dari.²⁰

a. Kharaj.

Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem *Kharaj* dengan sistem PBB adalah bahwa *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivita tanah bukan berdasarkan *zoning*.

b. Zakat.

Sistem pajak untuk masing-masing bentuk usaha: Zakat Pendapatan. Zakat ini dihitung berdasarkan nisab (pendapatan minimum), jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah nisab.

1) Zakat Peternakan

Karakteristik zakat peternakan ini khususnya adalah pengenaan zakat secara regresif, dimana makin banyak jumlah hewan peliharaan, makin kecil ratenya dan perbedaan tiap ukurannya untuk tiap jenis hewan.

2) Zakat Pertanian

Zakat pertanian menggunakan flat rate dibedakan antara jenis pengairan. Dikarenakan bila hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama sehingga bila hasil pertaniannya melimpah, di khawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.

²⁰ Adiwarmaz azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2006), h. 119

3) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan itu disyariatkan dalam Islam. Caranya, yaitu dengan menghitung nilai jumlah barang dagangan, kemudian digabung dengan keuntungan bersih setelah dipotong utang dan biaya operasional dagangnya.

- c. Khums yaitu seperlima dari harta rampasan perang yang dibagi sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

وَعَلِمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِيتِمَىٰ
وَلِمَسْكِينٍ وَبَنٍ لَّسَبِيلٍ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
لِفُرْقَانٍ يَوْمَ لَتَقَىٰ لَجَمْعَانَ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasi konsep moral tersebut. Untuk itu dalam mersepon laju perkembangan pemikiran ini yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, Mengubah pola pikir (mindset) dan pembelajaran mengenai nilai islam dari yang fokus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan. *Kedua*, keluar dari ketergantungan kepada pihak lain.

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim

dapat menjadi hak miliknya. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, misalnya dalam bentuk pendapatan maka tentunya tidak orang yang mau berusaha keras²¹. Oleh karena itu dilain pihak prinsip moral mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi harus berfungsi sebagai pembebas manusi dari karakter materialistis. Hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan dalam pespektif islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen dan konsp etika tersebut sangat terkait dengan hokum Allah SWT karena bersentuhan dengan area halal haram.

Pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut hanya Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Firman Allah SWT

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِلّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu". (QS. Ali Imran:189)²²

Sedangkan manusia hanyalah di beri hak kepemilikan terbatas yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari kewenangan adalah tugas (taqlif) untuk menjadi seorang khalifah yang beribadah di muka bumi ini. Sekapin memiliki harta adalah fitrah manusia, Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia. Dimana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT. Tolak ukur yang dipakai adalah kemampuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dan Islam juga memberikan predikat terbaik

²¹ Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 28

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, h. 76

(khairunnas) kepada siapa saja yang mampu memberikan kemanfaatan hartanya bagi orang lain. Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْيُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتَعَاً وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah maka pahalanya untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan hanya untuk mencari keridlaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya”. (QS. Al-Baqarah:272)²³

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) pada suatu negara. Saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya. Akan tetapi, bagi sejumlah ekonom, GNP per kapita sebagai ukuran kesejahteraan adalah konsep yang tidak sempurna.²⁴ Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran kesejahteraan ekonomi dalam konsep GDP atau GNP riil harus mampu menggambarkan kesejahteraan pada suatu negara secara riil. Konsep GDP atau GNP riil dalam ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut. Beberapa analisis penerapan konsep GDP riil/ per kapita secara Islami sebagai indikator kesejahteraan suatu negara dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

- Menghitung semua produk yang dihasilkan oleh masyarakat karena umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung

²³ *Ibid*, h. 47

²⁴ Lihat Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 58-62

dalam GNP tidak mencerminkan kondisi riil pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, tidak tercakup dalam GNP padahal GDP seharusnya mampu menggambarkan dan mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita secara riil baik yang masuk ke dalam pasar maupun tidak.

- Memberi tekanan/ bobot terhadap produksi bahan kebutuhan pokok. Selama ini konsep pendapatan nasional memberi nilai yang sama antara bahan kebutuhan pokok dengan komoditas tersier lain jika nilai nominalnya sama.
- Pendapatan nasional harus mampu mengukur produksi di sektor pedesaan dan sektor riil. Tingkat produksi komoditas dalam subsistem pedesaan dan sektor riil begitu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Data tersebut dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi riil dan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islami. Pendapatan per kapita yang ada selama ini tidak menyediakan data yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Dalam konsep *measures for economic welfare* kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung dari seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada tingkat konsumsinya. Konsep tersebut menggunakan 6 kategori yang lebih kompleks dalam pendekatannya, antara lain; (1) belanja untuk keperluan publik (*public expenditure*), (2) belanja rumah tangga (*durable goods consumption*), (3) memperkirakan kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan (*loss of welfare due to pollution, urbanization and congestion*) (4) memperkirakan nilai jenis barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama satu tahun (*value of durable actually consumed during the year*), (5) memperkirakan nilai pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang tidak melalui transaksi pasar (*value of non-market services*), dan (6) memperkirakan dari nilai rekreasi (*value of leisure*).

- Pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Di negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan memiliki peranan penting. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bahkan produktif dalam masyarakat melalui zakat, infak dan shadaqah. Intinya, ekonomi islam mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam.²⁵

3. Distribusi Pendapatan Nasional

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan

Persoalan distribusi mendapat respon beragam dari para ekonom muslim. Satu pendapat mengatakan bahwa problem utama ekonomi adalah produksi sehingga distribusi sangat minim mendapat perhatian ekonom. Namun pendapat lain menjelaskan bahwa persoalan tersebut terletak pada masalah distribusi. Bahkan kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, bukan karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan.²⁶

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 195. Lihat juga Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2015),2-7

²⁶ Ulasan rinci tentang pandangan-pandangan ekonom di atas, lihat Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga,

Distribusi (*dulah*)²⁷ secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (distribusikan).²⁸ Sedangkan menurut istilah mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.²⁹ Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi.³⁰ Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.³¹ Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat.

Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan.
- Pendapatan jika dilihat dengan menggunakan koefisien gini, maka akan terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perkotaan lebih buruk daripada daerah di luar Kota
- Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan.
- Pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban

2009), h. 17-23

²⁷ Kata *dulah* dalam Alqur'an diulang sebanyak dua kali yaitu QS al-Hasyr:7 dan QS Ali Imran: 3. Pada QS al-Hasyr kata *dulah* dipergunakan dalam konteks pembagian fai agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sedangkan pada QS Ali Imran kata ini dipergunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya suatu bangsa

²⁸ Taqiyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 274

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 71

³⁰ M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 113.

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996), h.93

bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Kembali kita perhatikan penjelasan teori ekonomi yang dualistik tentang terjadi kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara sedang berkembang, maka pertama-tama relevansinya terlihat dalam pola kesenjangan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

- Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah
- Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.³²

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Pada umumnya ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan dalam pendapatan nasional. Pertama, indikator distribusi pendapatan perorangan. Kedua, kurva Lorenz. Ketiga, koefisien gini³³. Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu

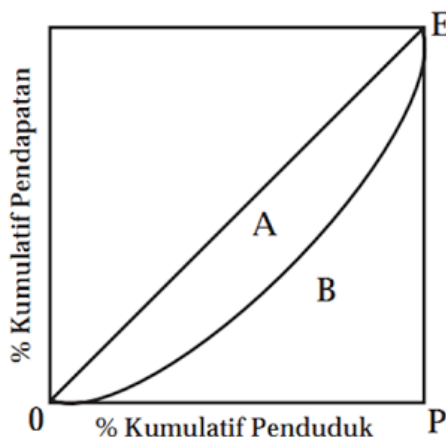
³² Uraian lengkap tentang ketimpangan di atas lihat Ahmad Erani Yustika. *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 91-150

³³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 166

juga sebaliknya, semakin berimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien gini, semakin kecil nilainya, menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya. Kuznets dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Sementara itu menurut Oshima bahwa negara-negara Asia nampaknya mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan. Ardani mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

a. Gini Ratio dan Kurva Lorenz

Gini ratio merupakan satu peralatan analisis yang dipergunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada satu daerah tertentu. Sedangkan kurva Lorenz adalah suatu kurva yang menunjukkan ukuran distribusi pendapatan dengan penilaian merata, sedang dan timpang. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Gambar: Kurva Lorenz

Koefisien Gini sebagai sebagai rasio dari luasan yang terletak di antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luasan segitiga di bawah garis diagonal. Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE. Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya mendekati satu.³⁴

Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengatagori-kan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

³⁴ Iskandar Putong: *Economics* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 304-306

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
... < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
... > 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Indeks atau Rasio Gini adalah suatu koefisien yang, berkisar dari angka 0-1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisien nya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Sebaliknya koefisien yang kian besar (semakin mendekati 1) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Angka rasio gini dapat ditaksirkan secara visual langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas are yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga OBE. Semakin melengkung kurva Lorenz akan semakin luas area yang dibagi, rasio gini akan kian besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang.

b. Indikator Bank Dunia

Selain gini ratio, indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah kriteria Bank Dunia. Menurut laporan Bank Dunia Indonesia memiliki salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di kawasan Asia Timur, dengan naiknya koefisien Gini dari 0,32 pada 1999 menjadi 0,41 pada 2012. Naiknya ketimpangan bisa berdampak buruk pada kondisi sosial dan politik, juga pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan memerlukan strategi holistic yang mencakup adanya akses layanan umum yang setara, meningkatkan produktivitas penduduk miskin, serta meningkatkan program perlindungan sosial yang bisa membantu masyarakat miskin dari berbagai guncangan³⁵

³⁵ <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-inequality-in-indonesia>

Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan:

- a. Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
- b. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan
- c. Rendah, bila 40%, penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.³⁶

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang di dasarkan atas konsep Islam, antara lain :

- a. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah. Oleh sebab itu distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai antara satu dengan lainnya karena yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain.
- b. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Misalnya minuman keras, obat terlarang dan pembajakan

Persoalan distribusi berhubungan erat dengan pertanyaan: untuk siapa produksi? Bagaimana produksi didistribusikan di antara faktor-faktor produksi yang berbeda-beda? Bagaimana mengatasi problem ketidaksamaan sebagai akibat dari distribusi? Ini merupakan tiga pertanyaan utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat dengan sistem ekonomi apa pun yang menjadi anutannya. Distribusi

³⁶ Lihat criteria ini dalam sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=21

sebagaimana dirujuk oleh istilah *dulah* dalam al-Qur'an (QS. al-Hashr 59:7) merupakan landasan pentingnya peredaran harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang tertentu yang sudah kaya atau berkecukupan secara ekonomi (QS. al-Hashr 59:7) Di samping pernyataan langsung tentang perlunya pendapatan dan kekayaan didistribusikan sehingga tidak terjadi konsentrasi, al-Qur'an juga menyebutkan tiga macam tindakan yang mencegah terjadinya proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta (*al-iktinaz*),³⁷ bermegah-megahan yang melalaikan (*al-takasur*/ QS. al-Takasur 102:1), dan celaan atas penumpukan harta dan terlalu "perhitungan" (*jama`a mal wa`addadah*/QS. al-Humazah 104:1-2.).

Untuk menjalankan proses distribusi dibutuhkan kriteria atau prinsip yang menentukan dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki hubungan dengan kekayaan dan pendapatan. Kriteria distribusi yang memungkinkan cukup banyak sehingga menyebabkan perbedaan perolehan antara individu. Kriteria itu meliputi: pertukaran (QS. al-Baqarah 2:275.), kebutuhan (QS. Hud 11:6.), kekuasaan, (QS. Hud 11:3.) dan sistem sosial atau nilai etis. Kriteria pertukaran dan kebutuhan berbeda dengan prinsip balas jasa yang memandang "usaha" dan "kontribusi aktual" sebagai dasar distribusi. Kriteria usaha diterima oleh al-Qur'an karena "setiap orang tidak akan menerima kecuali apa yang ia usahakan". Namun, kriteria kontribusi aktual tidak sepenuhnya diterima karena beberapa alasan: bahwa dalam harta dan kekayaan seseorang ada hak bagi mereka yang kurang beruntung; mereka yang memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga dengan sendirinya memperoleh tunjangan lebih daripada mereka yang bujangan; dan dengan ketulusan dan kesukarelaan seseorang diperbolehkan berkorban untuk orang lain sehingga bagiannya ia distribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

Skema distribusi perlu didefinisikan melalui kebijakan distribusi berdasarkan aturan-aturan syariah dengan seluruh implikasi ekonominya. Skema distribusi itu meliputi dua macam: *Pertama*, distribusi pra produksi atas sumber daya atau kekayaan alam, antara

³⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al-`Arab*, vol. 5, hlm.401-402.

lain: 1) kemitraan untuk mengatasi kesenjangan antarindividu yang diakibatkan oleh perbedaan kuantitas aset produktif (QS. al-Zukhruf 43:32.) baik berupa kepentingan publik dan beberapa jenis sumber daya alam; 2) larangan membatasi akses ekonomik karena bertentangan dengan prinsip kemitraan atas manfaat kekayaan alam dari tanah yang tidak bertuan; 3) merampas tanah yang tidak produktif untuk tujuan produktif melalui mekanisme *iqta`*; 4) regulasi barang tambang untuk kesejahteraan publik³⁸; 5) efisiensi sumber daya air dan sumber daya alam terbarukan. *Kedua*, regulasi distribusi output produksi (kekayaan dan pendapatan) antara lain: 1) berbagi surplus pemanfaatan modal produksi³⁹; 2) warisan untuk pemerataan kekayaan (QS an-Nisa':7); 3) zakat sebagai wujud solidaritas sosial (QS al-Taubah 9:60.); 4) wakaf sebagai filantropi sosial (QS. Ali `Imran 3:92); 5) hadiah tanpa pamrih⁴⁰; 6) fay (QS. al-Hashr 59:6), ghanimah (QS. al-Anfal 8:41.) dan rikaz untuk kesejahteraan bersama.

Memberikan surplus pemanfaatan modal berupa aset-aset tetap memperkuat penolakan al-Qur'an terhadap prinsip balas jasa yang mengharuskan adanya kompensasi terhadap apa pun dalam aktivitas produksi, termasuk surplus modal harus diganti dengan biaya bag yang ingin mempergunakannya. Sistem warisan kekayaan memberikan argumen atas penolakan al-Qur'an terhadap pernyataan prinsip balas jasa bahwa setiap orang harus menerima balasan sesuai dengan kontribusi aktualnya. Warisan mendistribusikan dan mentransfer kekayaan dari orang meninggal kepada anggota keluarganya yang berhak tanpa memandang apakah anggota keluarga itu memberi kontribusi atau tidak atas kekayaan orang meninggal. Distribusi zakat merupakan bantahan atas prinsip yang menyatakan bahwa pajak apa pun atas pendapatan dan kekayaan (dan pungutan semisalnya termasuk zakat) oleh negara merupakan pelanggaran atas hak-hak kepemilikan eksklusif (*self-interest*) karena membiarkan orang untuk memiliki sebagian hak orang lain; pajak dapat dikatakan sama dengan

³⁸ Abu Daud, *Sunan*, kitab al-kharaj wa al-Imarah wa al-fay', hadis no. 2660.

³⁹ Muslim, *Sahih*, kitab al-luqatah, hadis no. 3258.

⁴⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Mu`arrifah, t.th.), vol. V, h. 243.

kerja paksa; tidak adil seseorang bekerja untuk kepentingan orang lain. Di sisi lain, tampak jelas bahwa praktek zakat merupakan bantahan atas prinsip balas jasa tentang “kontribusi aktual”. Pengeluaran zakat dari kepemilikan pribadi adalah sah dan penerima zakat juga sah memperoleh sekaligus memiliki bagian itu tanpa memandang kontribusi aktualnya. Berbeda dengan prinsip utilitarianisme yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan mengorbankan sekelompok kecil lainnya, institusi wakaf bekerja dengan logika kepentingan publik (*al-maslahah al-`ammah*). Artinya, demi kepentingan publik, individu diperkenankan mewakafkan harta/kekayaannya dengan pengorbanan tulus. Dengan kata lain, individu berkorban demi kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya atas nama kesejahteraan masyarakat kepentingan individu atau kelompok kecil dikorbankan.

Sedangkan skema distribusi pendukung meliputi: larangan atas riba sebagai eksploitasi terhadap mereka yang lemah⁴¹; larangan atas penimbunan harta; dan larangan atas monopoli. Meski tiga skema distribusi di atas sudah dijalankan, masih ada kemungkinan kemiskinan dan ketertindasan, sehingga enimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hidup manusia, kurang Bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah kriminal. Dalam Al-qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW masalah distribusi disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang antara lain;

Pertama: Alqur'an menjelaskan cara pendistribusian dan sumber-sumbernya yang penting misalnya pembagian zakat yang mendetail, pembagian ghanimah dan harta fa'i, kewajiban nafkah kepada keluarga serta kerabat.

Kedua: Menegaskan hukum-hukum distribusi yaitu ada yang wajib atau suka rela (sunnah) bahkan termasuk pendusta agama bagi yang tidak mau berkontribusi pada orang fakir-miskin khususnya anak yatim piatu.

⁴¹ QS. Ali `Imran 3:130; lihat juga QS ar-Rum 30:39.

Ketiga: Islam secara tegas melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja (QS.Al hasyr 59:7).

Keempat: Allah SWT memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia (kesejahteraan) dan akhirat (syurga).

Kelima: sikap para pemimpin kaum muslimin (khalifah) sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan yaitu keadilan dalam hukum dan keadilan dalam distribusi.

Muhammad Anas Zarqa mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf dan zakat. Menurutnya ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*needs*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Distribusi juga didasarkan atas kebutuhan seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan juga berperan penting, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses. Beberapa kebijakan redistribusi dalam sebuah negara juga sering kali diadopsi dari sistem dan nilai-nilai sosial yang ada, sebagai contoh:

- a. Alokasi pendapatan nasional untuk para tokoh agama dalam suatu masyarakat.
- b. Alokasi dana untuk para pejabat publik.
- c. Alokasi dana untuk institusi sosial.
- d. Kebijakan tentang larangan atas transaksi barang-barang yang tidak bermanfaat.

Lebih lanjut Zarqa mengemukakan beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk.

- b. Menimbulkan efek positif bagi pemberi.
- c. Menciptakan kebaikan di antara semua orang, antara kaya dan miskin.
- d. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
- e. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam.
- f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.⁴²

Dalam ajaran Islam dikenal dua macam distribusi yaitu distribusi secara komersial dan mengikuti pasar dan distribusi yang bertumpu pada keadilan sosial masyarakat. Distribusi komersial melalui proses ekonomi, misalnya gaji, upah, dan keuntungan usaha. Sedangkan distribusi yang bertumpu pada keadilan social di antaranya melalui warisan, zakat, infaq dan sedekah.⁴³ Sedangkan tujuan distribusi dalam Islam antara lain; *pertama*, menyatukan hati manusia dalam kebaikan dan kebenaran dari nilai-nilai ilahiyah sehingga mereka semakin taat kepada pencipta-Nya; *Kedua* membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat serakah, tamak, egois, dan individualis. *Ketiga* membangun kesetiakawanan sosial dan kebersamaan, menjalin ikatan cinta kasih sayang dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. *Keempat* tujuan ekonomi yaitu, pengembangan harta, memberdayakan sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi serta pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan berdaya guna. *Kelima*, menghindari kegiatan spekulatif dan kazaliman dalam distribusi pendapatan dan kekayaan

Untuk merealisasikan distribusi yang adil maka perlu diupayakan adanya politik distribusi yang mencakup beberapa hal; yaitu *Pertama*, aturan kepemilikan, baik yang terkait dengan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum. *Kedua* distribusi pemasukan yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggungjawab, besarnya gaji/upah

⁴² Muh Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986), h. 166.

⁴³ Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. h. 392-394

dan tingkat kesejahteraannya, model pembagian hasil dari modal baik modal uang maupun modal barang, serta pemanfaatan tanah. *Ketiga* jaminan sosial yaitu tanggungjawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan negara terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari keburukan mereka yaitu tidak merealisasikan kebutuhan mereka. Jaminan sosial ini merupakan tanggungjawab pemerintah serta masyarakat secara umum terutama yang memiliki kecukupan. Olehnya itu perlu segera diwujudkan solusi sistem distribusi yang yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia baik pada tingkat individu, kelompok maupun negara yaitu sistem distribusi yang sesuai syariah.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Ada dua istilah yang sering dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi yaitu pertumbuhan dan pembangunan. Dalam buku-buku ekonomi istilah pembangunan ekonomi (*economics development*) biasanya dibedakan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Istilah pembangunan ekonomi biasanya merujuk pada pembangunan di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan ekonomi di negara-negara maju.⁴⁴ Namun terlepas dari perbedaan tersebut, kajian tentang pembangunan/pertumbuhan ekonomi menempati posisi yang cukup penting, karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kemakmuran, taraf hidup dan kesempatan kerja baru kepada penduduk.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk,

⁴⁴ Teori-teori pembangunan baik dari Klasik, Neo klasik, maupun dari Keynesian lebih lanjut baca M.L. Jhingan. *The Economics of Development and Planning*. Terj. D. Guritno. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 81 – 165

jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli – ahli ekonomi Klasik terutama menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Menurut pandangan ahli – ahli ekonomi Klasik, hukumpertambahan hasil yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus – menerus berlangsung.

Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan relatif berlebihan,tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi, karena produktivitas marginal penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Dari uraian mengenai teori pertumbuhan Klasik, telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, Produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita.

Selain pendapat dari para ekonom klasik, beberapa ekonom menguraikan definisi pertumbuhan ekonomi, yaitu : Profesor Simon Kuznets memberikan suatu definisi mengenai pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Ibn Khaldun, untuk menciptakan kesejahteraan, maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga

membuat sebuah lingkaran yang disebut M. Umer Chapra dengan daur keadilan atau *cycle of equity*.⁴⁵ Komponen-komponen tersebut adalah kekuatan penguasa (*al-mulk*), *syari'ah* (hukum), rakyat (*ar-rijal*), kekayaan (*al-mal*), pembangunan (*al-imarah*), dan keadilan (*al-'adl*). Semua variabel tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi dan menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban/negara. Kekuatan penguasa (*al-mulk*) tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi *syari'ah*. *Syari'ah* tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa (*al-mulk*). Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat (*ar-rijal*). Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan (*al-mal*). Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan (*al-imarah*). Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (*al-'adl*). Keadilan adalah kriteria (*al-mizan*) Allah menilai hamba-Nya dan penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan⁴⁶

2. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat. beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain⁴⁷

- a. Produk Domestik Bruto PDB adalah merupakan jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukuran pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya.

⁴⁵ M. Umer Chapra. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 127

⁴⁶ Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: an Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal (United Kingdom: Princeton University Press, 1967), h.

⁴⁷ N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*. Edisi keempat, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 72

- b. PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita PDB per kapita Merupakan Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai PDB atau PDRB saja.
- c. Pendapatan Per jam Kerja Pendapatan per jam kerja sesungguhnya adalah alat pengukur yang paling baik untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian.
- d. Harapan Hidup waktu Lahir Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Memang kesejahteraan dapat benar-benar dirasakan bila seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan,

pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Hubungan antara distribusi Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang khas. Bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di tingkat dunia adalah sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pendapatan per kapita dan semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.
- b. Fenomena tersebut terjadi di Asia Tenggara, negara sedang berkembang lainnya, Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat.

- c. Penyebab ketimpangan karena pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan publik.
- d. Simon Kuznets (Hipotesis kurva U terbalik): evolusi distribusi pendapatan dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri). Ketimpangan pendapatan bertambah besar akibat urbanisasi dan industrialisasi.

Barro menyatakan bahwa data panel yang meliputi banyak negara menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara laju pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Untuk pertumbuhan ekonomi, terdapat indikasi bahwa ketimpangan memperlambat pertumbuhan di negara miskin, tetapi mendorong pertumbuhan di negara kaya.

C. Teori Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan.

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini. Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak

tahun 1950an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu mrujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat di pengaruhi oleh perspektif income proverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek permasalahannya. Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial masyarakat atau kelompok masyarakat.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik system pasar bebas, namun tidak memandang system kapitalis sebagai system yang harus di hapuskan karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian bebas ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbedaan kedua paradigma tersebut dalam melihat kemiskinan maupun penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan penyebab maupun memberikan alternative solusi mengenai mengatasi kemiskinan, seperti terlihat dalam table.

Tabel 3
Perbedaan kedua Paradigma

Paradigma	Neo-Liberal	Demokrasi-Sosial
Landasan Teoritis	Individual	Struktual
Konsepsi dan Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Landasan Teoritis	Individual	Struktual
Penyebab Kemiskinan	Lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian	Ketimpangan Struktur
Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara menyeluruh	Penyaluran pendapatan dasar secara Universal

Sumber: dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrafe (1998;176)

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut yaitu pendekatan keberfungsian social. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi-sosial. Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kapitabilitas individu, keluarga dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Salah satu teori yang mendukung paradigm keberfungsian social adalah teori yang dikemukakan oleh Baker. Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses aktivitas kehiduannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat pendekatan ini memnadnag kelompok miskin bukan objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinan. Keberfungsian social dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat ditanyakan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan social ekonom yang terkait dengan situasi kemiskinan.

3. Paradigma Ekonomi Islam

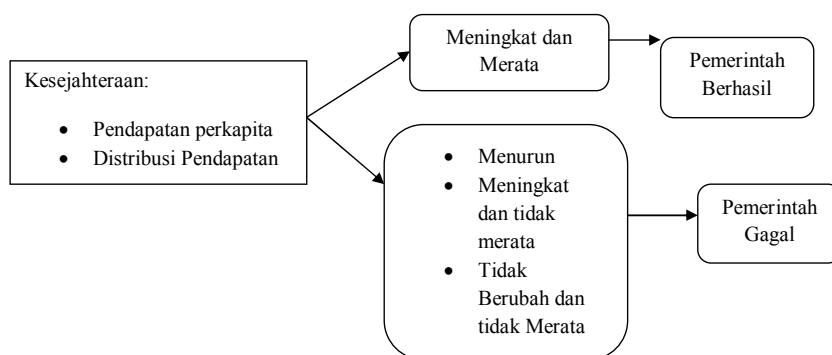
a. Definisi Kemiskinan

Penelusuran terhadap al-Qur'an menunjukkan ada delapan kata yang berkenaan dengan makna kemiskinan. Istilah-istilah tersebut adalah *مسكين*, *فقير*, *إملاق*, *سائل*, *محروم*, *قانع*, *معتز*, *بائس*.

Kata *مسكين* dengan berbagai derivasinya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Kata *فقير* beserta turunannya terulang sebanyak 13 kali. Kata *إملاق* dan *محروم* masing-masing tercatat sebanyak 2 kali. Kata *سائل* dengan ragamnya terulang 4 kali. Dan terakhir kata *قانع*, *معتز*, dan *بائس* masing-masing disebutkan sekali saja.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2
Kesejahteraan



Untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

1) Pendekatan Absolute

Pendekatan ini melihat pada batas minimum yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Dengan batas minimum yang sama akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama karena tergantung pada waktu dan tempat. Namun demikian pendekatan ini masih banyak digunakan terutama terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.

2) Pendekatan Relatif

Pendekatan ini membandingkan antara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini lebih melihat pada ketidakseimbangan pendapatan. Selama ketidakseimbangan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap ada.

3) Pendekatan Kebutuhan Dasar

Pendekatan ini yang dikemukakan oleh Townsend menekankan pada dua unsure penting, yaitu : *Pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi pemenuha kebutuhan substensi pangan, papan, pakaian, dn barang-barang rumah tangga tertentu, *Kedua*, Pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

b. Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan yang miskin (rumah diperkampungan miskin dan kotor serta perkampungan dengan sedikit pelayanan social) upah rendah dan tidak mecukupinya peraturan dalam sector tenaga kerja formal serta sulitnya serta keuangan di sector tenaga kerja informal. Meskipun riset menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, disamping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat dimana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya melalui pendidikan anak-anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati/hemat.

Kemudian ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh diperkotaan:

- 1) Sikap *laisser fair*, pemerintah membiarkan dibangunnya perumahan liar mengikuti permainan ekonomi.
- 2) *Alalmis approach*, pendekatan yang memandang bermuncunya gubug-gubug reyot kaum papa sebagai ancaman.
- 3) Pendekatan sesisi (*partial approach*), pemerintah membiarkan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan

perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit.

- 4) Total approach, pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan secara besar-besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah
- 5) Pendekatan progresif (*progresif approach*), pemecahan bersama penghuninya.⁴⁸

Selain kemiskinan di perkotaan, kemiskinan juga dapat ditemui di pedesaan. Berdasarkan data statistik kemiskinan di pedesaan melebihi perkotaan, Biasanya kemiskinan di pedesaan lebih buruk. Kemiskinan diukur oleh pendapatan rendah dan hal tersebut bertambah buruk di pedesaan, substansi perbedaan terdapat dalam biaya hidup antara kota dan desa. Pada umumnya masalah kekurangan gizi, pendidikan yang tidak mencukupi, harapan hidup rendah serta rumah dibawah standar.

Banyaknya masyarakat miskin berlokasi di pedesaan dimana biasanya tanah untuk bertani semakin langka, produktivitas hasil pertanian rendah, kekeringan, banjir dan penurunan lingkungan. Kesempatan untuk bekerja di sector non pertanian terbatas dan jumlah tenaga kerja cenderung meningkat pada musim tertentu. Masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat mengakses sarana social seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur (irigasi, informasi, bantuan teknik dan pusat pemasaran). Dua karakteristik umum kemiskinan di pedesaan yaitu tingkat buta huruf yang masih tinggi dan pendapatan yang rendah.

c. Bentuk-bentuk kemiskinan

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan perbedaan

⁴⁸ Nas, d. P.J.M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar sosiologi Kota*. Jilid I. Jakarta: Bharatara Karya Aksara

dalam rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, ekonomi yang buruk bencana alam. Masyarakat miskin seringkali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan dimensi dari kemiskinan.⁴⁹ Ada empat bentuk kemiskinan.

1) Kemiskinan Pendapatan.

Kemiskinan Pendapatan adalah: Seseorang dikatakan miskin jika dan hanya, pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

2) Kemiskinan manusia.

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan–pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas– dan merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia. Ada tiga elemen yang mencerminkan indeks kemiskinan manusia, yakni: tingkat umur, pengetahuan dan standar hidup yang layak

3) Kemiskinan kebutuhan dasar.

Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.

4) Kemiskinan kemampuan.

Kemiskinan kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.

⁴⁹ World bank, *Global Development finance*, 1998 (Washington,D,c: World Bank,1998)

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
- 2) Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum.
- 3) Tingkat Pendidikan Rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
- 4) Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Pertama, pengangguran. Banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung

terhadap tingkat kemiskinan.

Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu.

Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin.

Keempat, kesehatan. Biaya pengobatan sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia Baik di perdesaan maupun perkotaan.

Kelima, Agama. Agama juga berdampak dari kemiskinan. Saat seseorang sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak sedangkan dia tidak berpendapatan maka terpaksa dia mencuri, merampok, dsb. Mereka tidak mengindahkan halal haram lagi, bagi mereka jika semua terpenuhi mau itu haram mereka lakukan dan agama pun tidak dihiraukan lagi.

d. Strategi Penanggulangan Kemiskinan menurut Al Quran

Problematika sosial yang kita hadapi di dunia ini, yang salah satunya adalah kemiskinan ini telah diwanti-wanti oleh al-Qur'an. Sehingga sebenarnya al-Qur'an telah melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kemiskinan yang bergitu luas di kalangan penduduk bumi ini. Kemiskinan ini sangatlah berbahaya,

baik untuk diri sendiri maupun untuk agama kita tercinta Islam. Berapa banyak orang-orang yang pindah agama lain Karena mie instan satu kardus. Bahkan, demi menyambung hidup mereka rela mengorbankan akidah. Inilah bahayanya penyakit yang dinamakan kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (الحديث)

Hampir saja kefakiran itu menyebabkan kepada kekufuran

Maka dari itu, al-Qur'an telah memberikan beberapa strategi/langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan ini, di antaranya:

1) Alqur'an menyeru untuk bekerja dan Berusaha

Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha. Bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rizki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang mana rizki kita itu. Dengan tegas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini mencari fadlillah (rizki), seperti firmanNya yang tertuang dalam surat al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumu'ah (62):10)

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan ukhrawi itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun tidak boleh bagi kita untuk

melupakan kehidupan dunia ini. Hal ini dikarenakan kehidupan dunia itu merupakan jembatan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akherat. Bekerja itu bisa dikatakan bukanlah suatu 'kewajiban', namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menjangkiti kita, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akherat itu akan terganggu. Bekerja dan berusaha ini mutlak diperlukan guna menunjang kehidupan kita di dunia ini. Tanpa adanya usaha sangat sedikit peluang untuk menjadi sukses dalam menapak hidup ini.

2) Hidup Hemat dan tidak Berlebih-lebihan

Islam serta tidak berlebih-lebihan karena Allah sangat membenci sikap berlebih-lebihan. Allah SWT melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Allah SWT bahkan menyatakan bahwa orang yang suka berlebih-lebihan itu termasuk saudaranya syaitan. Allah Swt berfirman pada Surat al-Isra' ayat 26-27:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَامْسُكِ كَيْنَ وَبَنَ لَسْبِيلٍ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا
إِنَّ لِمُتَبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ لَشَيْطَانٍ وَكَانَ لَشَيْطَانٌ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Isra': 26-27)⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 145

Ayat di atas menjelaskan bahwa selain berbakti, berkhidmat, dan menanamkan kasih sayang, cinta, dan rahmat kepada orang tua, itu pun hendaknya memberi bantuan kepada kaum keluarga yang dekat karena mereka paling utama dan berhak untuk ditolong. Allah memerintahkan manusia untuk berbakti dan berbuat baik tidak hanya kepada orang tua saja, namun masih harus berbuat baik kepada tiga golongan lain, yaitu: kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang terlantar. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan karena suka mengikuti dan sangat penurut kepadanya. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung ketaatan. Jika kita berlebih-lebihan di muka bumi ini maka akan terjadi kerusakan-kerusakan akibat keserakahan kita. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup seperti pemanasan global yang santer dibicarakan akhir-akhir ini.

3) Mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat serta menyeru kepada shadaqah

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (QS. Al Baqarah:43).

Menurut Priyonggo Suseno, berbeda dengan konsep sosialisme yang mengandalkan peran pemerintah dalam distribusi ekonomi, Islam telah menciptakan suatu instrumen *built-in* dalam distribusi, yaitu zakat. Di dalam sistem

perekonomian yang membebaskan diri dari nilai ekonomi liberal, distribusi pendapatan dalam masyarakat dikendalikan oleh mekanisme pasar. Distribusi atau mengalirnya pendapatan antar masyarakat hanya diwadahi dalam bentuk mekanisme kerja pasar dan tidak ada mekanisme yang secara otomatis meredistribusi pendapatan sehingga mereka yang posisi tawarnya lemah bisa meningkat.⁵¹

Dalam perekonomian bebas berlaku hukum kesamaan harga, dimana barang/jasa akan mengalir dari suatu pasar yang harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Proses ini akan terjadi secara terus menerus sehingga harga di setiap pasar mendekati sama dan tidak menguntungkan bagi setiap pengusaha untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut. Berlakunya hukum ini juga menjadi penghambat terjadinya proses distribusi pendapatan antar masyarakat. Sebagai misal naiknya tingkat upah di suatu perusahaan atau daerah tidak akan terjadi dalam jangka panjang karena hal ini akan diukuti oleh gelombang aliran tenaga kerja menuju daerah yang upahnya tinggi hingga upah antar daerah mendekati titik yang sama. Jika sistem ekonomi bebas ini berlangsung terus, maka proses distribusi akan macer dan berdampak pada aspek sosial dan politik. Ketimpangan pendapatan merupakan gejala awal dari dampak liberalisasi ekonomi yang bisa berujung pada kecemburuan sosial dan konflik sosial.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam dilekatkan kepada kewajiban orang kaya (muzakki) dengan insentif yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menjamin bahwa dengan membayar zakat (sedekah) tidak akan

⁵¹ Priyonggo Suseno. *Peranan Zakat dalam Transformasi Ekonomi*. <http://lazisuii.org/>

membuat orang miskin, bahkan hartanya di sisi Allah akan di lipat gandakan (QS 2: 276). Kepahaman masyarakat terhadap ajaran Islam akan mendorong pada mekanisme pembayaran zakat ini meskipun peran pemerintah sangatlah kecil. Dari kedelapan ashnaf (golongan) mustahiq zakat ini, yang diperintahkan untuk didahulukan adalah fakir miskin. Hal ini ini sangat kontras karena dua golongan inilah yang paling membutuhkan uluran tangan.

Demikianlah beberapa langkah yang dikemukakan al-Qur'an untuk mengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan yang selama ini melanda Negara-negara yang terutama sedang berusaha memajukan diri (*developing countries*). Bahkan seandainya saja setiap individu mengeluarkan kewajiban zakatnya di Negara kita tercinta Indonesia ini, maka tidak perlu lagi kita membayar pajak. Mengapa demikian? Karena semua itu telah tercukupi oleh pembayaran zakat kaum muslimin yang merupakan mayoritas agama penduduk Indonesia ini.

D. Distribusi Pendapatan

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping itu, juga tiak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) harus dipahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hdup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin⁵²

⁵² Nurul Huda, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 6

1. Konsep Analisis Gap

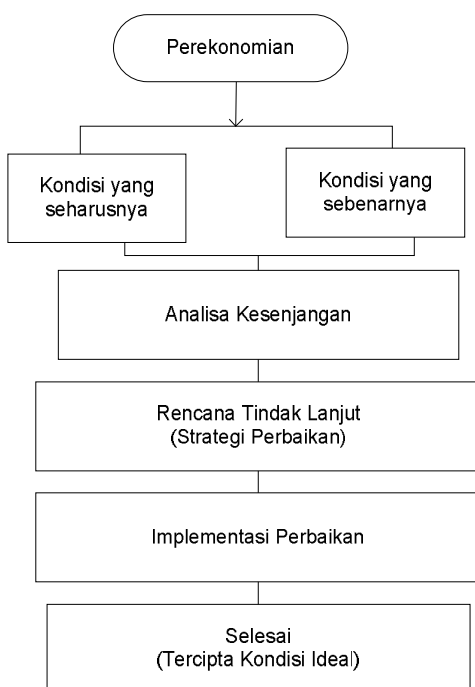
Gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Daerah, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut dapat menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang akan datang. Selain itu, gap analysis atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harafiah kata “gap” mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya.

Analisis kesenjangan (Gap Analysis) adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja organisasi atau perekonomian saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, misalnya yang sudah tercantum pada rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, analisis ini memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan.

Dalam perekonomian, analisa gap digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Analisa gap dapat juga diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual perekonomian dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sebagai metoda, analisa gap digunakan sebagai alat evaluasi kinerja ekonomi yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga

memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan.

Analisa gap terdiri dari tiga komponen faktor utama yaitu: 1). daftar karakteristik (seperti masyarakat, situasi politik) dari situasi sekarang (apa yang saat ini), 2). daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (apa yang harus), dan 3). daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. Analisis kesenjangan akan memicu perekonomian kemampuan apa yang saat ini dimiliki untuk mencapai situasi di masa depan. Jadi analisa gap adalah studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan.



Walaupun gap analysis sering digunakan di bidang manajemen, namun analisis gap ini juga dapat diterapkan dalam perekonomian untuk mengukur keberhasilan kinerja ekonomi. Gap akan bernilai (+) positif bila nilai aktual lebih besar dari nilai target, sebaliknya bernilai (-) negatif apabila nilai target lebih besar dari nilai aktual. Apabila

nilai target semakin besar dan nilai aktual semakin kecil maka akan diperoleh gap yang semakin melebar. Secara sederhana pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan gap analysis bermanfaat untuk:

- a. menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan.
- b. mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut, dan
- c. menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Gap analysis berfungsi untuk melihat kesenjangan yang terjadi antara kinerja perekonomian yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan distribusi pendapatan, gap analysis dapat digunakan untuk mengukur bagaimana distribusi yang seharusnya dengan bagaimana realitanya di tengah masyarakat. Dalam melakukan gap analisis, terdapat beberapa definisi operasional atau indikator yang dapat menjadi ukuran yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Dimensi fisik (tangibility) mengacu kepada performa petugas, keadaan sarana dan prasarana dan output yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata. Indikator yang digunakan biasanya adalah saran parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi pengurusan, media informasi keluhan dan jarak ketempat pelayanan.
- b. Dimensi ketepatan (reliability) yang mengacu pada aspek waktu, yang digunakan untuk mengukur ketepatan proses penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang telah ditetapkan. Pelayanan dapat dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan layanan yang terpercaya, meliputi proses waktu.
- c. Dimensi keterlibatan (responsiveness) yang mengacu kepada peran serta, dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan petugas dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Dimensi keterjaminan (assurance) merupakan kualitas pelayanan dilihat dari sisi kemampuan petugas dalam meyakinkan masyarakat. Dimensi yang meliputi kecakapan, keramahan dan kepercayaan dan keamanan ini dapat digunakan untuk mengukur performa petugas dalam memberikan rasa percaya dan rasa aman serta kepuasan masyarakat.
- e. Dimensi empaty (empathy) yang meliputi kemampuan komunikasi dan ketanggapan dapat digunakan untuk mengukur sikap dan motivasi dan ketanggapan dapat digunakan untuk mengukur sikap dan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan. Dimensi ini merupakan kualitas pelayanan yang diberikan berupa sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat.

E. Hasil penelitian yang relevan

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah : penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ganis Damarjati dengan judul: "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Propinsi Jawa Tengah*" Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan aglomerasi terhadap kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah selama lima tahun (2004-2008) Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Penurunan terjadi pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2006 sebesar 0,7295 dan tahun 2007 menjadi 0,7270. Meskipun terjadi penurunan Indeks Williamson dari tahun 2005 sampai 2007, namun angka tahun 2007 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 dan 2004.

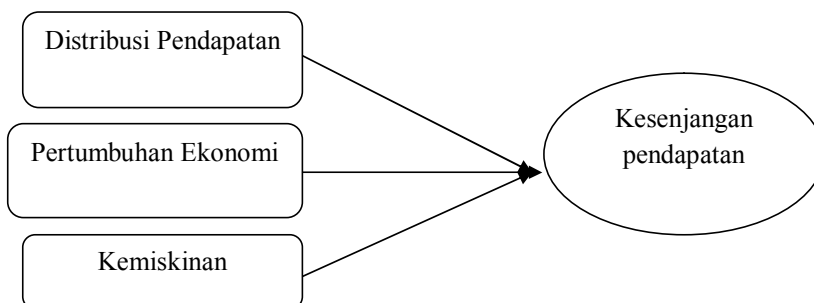
F. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar IV

Kerangka Pemikiran



Distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Adam Smith dan Marx berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba. cara sederhana untuk mengetahui masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Dalam hal ini, suatu perekonomian diasumsikan menjadi dua macam barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah.

Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar.

Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sector modern, dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah tetapi juga tingkat gaji/upah yang berbeda.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota Tebing tinggi merupakan sebagai upaya untuk membuat sebuah perubahan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang dari waktu sebelumnya sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Oleh karena itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010, diprediksi pertumbuhan ekonomi Tebing tinggi akan edikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini di tunjukkan dengan semakin baiknya kondisi perekonomian di kota Tebing tinggi sehingga ikut meniakkan kesejahteraan wilayahnya.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dimana keberadaannya masih perlu di kaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan masalah di atas. Maka hipotesis penelitian ini adalah Diduga tingkat kesenjangan terhadap pendapatan pada masyarakat di Kota Tebing tinggi tersebut masih normal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan seseorang peneliti dalam mengumpulkan datanya berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁵³. Untuk itu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu menitikberatkan kepada perhitungan statistik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melaksanakan penelitiannya dan penulis dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitiannya di kota Tebing Tinggi.

C. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵³ Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.151

pengambilan data dari lembaga– lembaga terkait, yaitu BPS Propinsi Sumatera Utara dan Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal – jurnal yang berhubungan dengan masalah kesenjangan pendapatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi dan majalah atau publikasi lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini penulis menjabarkan definisi operasional terhadap variable yang digunakan. Variabel yang dianalisis adalah pendapatan masyarakat kota dan desa di Tebing tinggi.

1. Pendapatan adalah pendapatan Kotamadya Tebing Tinggi yang diwakili oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu total barang dan jasa yang dihasilkan oleh Pemerintah Kotamadya Tebing Tinggi pada tahun 2008-2010
2. Tingkat Kesenjangan adalah tingkat distribusi PDRB yang didistribusikan untuk seluruh kecamatan dan desa yang ada di Tebing Tinggi dengan menggunakan Gini Ratio
3. Penduduk kota Tebing tinggi adalah seluruh penduduk Tebing Tinggi pada tahun 2008-2010 yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Tebing Tinggi

F. Metode Analisis

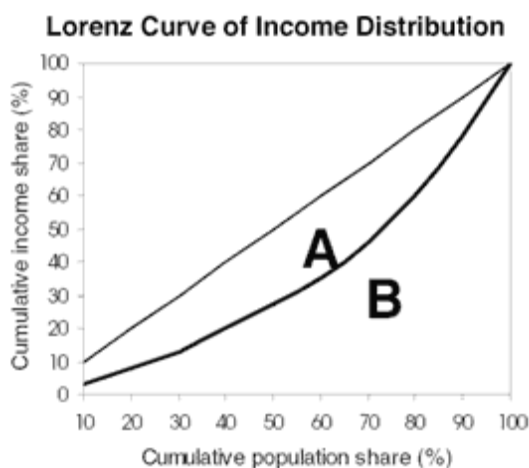
Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Dimana untuk membandingkan perbedaan pendapatan pada masyarakat kota dan desa dengan menggunakan Koefisien Gini (Gini rasio). Koefisien

Gini adalah ukuran statistik yang diperoleh dari kurva Lorenz. Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut.

Ide dasar perhitungan koefisien Gini adalah Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk. presentase komulatif Sumbu vertikal pendapatan nasional & Sumbu horizontal persentase komulatif penduduk.

Gambar 5

Gini Rasio



Semakin dekat dengan diagonal maka semakin merata pendapatan dan semakin jauh dengan diagonal maka semakin tidak merata pendapatan. Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1 yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan. Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi

pendapatan Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva Lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya. Rumus untuk mencari gini ratio adalah :

$$G_1 = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Dimana :

G= Gini rasio

X_k = kumulatif proporsi populasi

Y_k = kumulatif proporsi income/pendapatan

Y_k diurutkan dari kecil ke besar

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

G < 0,3 → ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang

G > 0,5 → ketimpangan tinggi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kota dari tujuh kota yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara, yang berjarak 78 Km dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi dengan Luas Wilayah 38.434 Km² terletak di bagian Timur Propinsi Sumatera Utara berada pada Garis 3°19° - 3°21° Lintang Utara dan 98°11° - 98°21° Bujur Timur yang dikelilingi oleh wilayah kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai
- Sebelah Timur : PT.Socfindo Kebun Tanah Besih Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan : PTPN III Kebun Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat : PTPN III Kebun Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 4

Luas Wilayah Kota Tebing Tinggi menurut 2010

Kecamatan	Luas Wilayah(km)	Persentase terhadap wilayah(%)
Tebing Tinggi Kota	3473	9,04
Rambutan	5935	15,44
Bajenis	9078	23,62
Padang Hilir	11441	29,72
Padang Hulu	8511	22,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi

Kota tebing Tinggi mempunyai 5 kecamatan dan kecamatan Padang Hilir lebih luas wilayahnya dibandingkan wilayah yang lain. Kota Tebing Tinggi merupakan daerah perlintasan (interland) dari Propinsi Sumatera Utara ke berbagai Kota, sehingga memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh berbagai pelayanan di Kota Tebing Tinggi seperti misalnya pelayanan kesehatan. Disamping itu Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh 4 (empat) buah aliran sungai besar dan kecil diantaranya; Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau yang disetiap tahunnya selalu datang banjir kiriman yang harus selalu diwaspadai dan menjadi Perhatian pemerintah Kota.

Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi, angka perkiraan tahun 2010 adalah sekitar 145.248 jiwa terdiri dari 71.356 laki-laki dan 73.356 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 10 tahun terakhir adalah sebesar 0,71 per tahun.

Tabel 5

JUMLAH PENDUDUK KOTA TEBING TINGGI

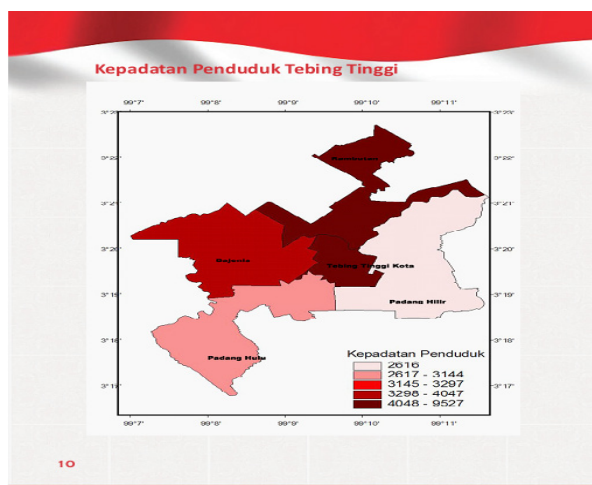
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Padang Hulu	13.196	13.516	26.714	98
Tebing Tinggi Kota	11.726	12.314	24.046	95
Rambutan	15.445	15.926	31.371	97
Bajenis	16.459	16.613	33.072	99
Padang Hilir	15.066	14.985	30.051	101
Jumlah	71.892	73.356	145.248	98

Sumber: Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi, 2010

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Tebing Tinggi terdapat di Kecamatan Bajenis, yaitu sejumlah 33.072 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, yaitu sebanyak 24.046 jiwa.

Gambar 6

Kepadatan Penduduk Tebing Tinggi



Jumlah angkatan kerja yang terdaftar di Kantor Perhubungan Departemen Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi selama tahun 2010 sebanyak 46.464 laki-laki dan 27.210 perempuan

Tabel 6

Penduduk berumur 15 thn ke atas yg bekerja, ,mencari pekerjaan,dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Angkatan Kerja	46.464	27.21	73.824
– Bekerja	42.524	23.227	65.751
– Mencari Pekerjaan	2.024	2.328	4.325
2. Bukan angkatan Kerja	25.428	46.176	71.424
Jumlah	71.892	73.356	145.248

Kota Tebing Tinggi ini dikenal sebagai wilayah yang mengandalkan industri dan perdagangan. Sebagai penyumbang kegiatan ekonomi terbesar, sektor industri tidak bisa mengenyampingkan keberadaan industri-industri kecil dan rumah-rumahan yang tersebar ditiga kecamatan. Kedua jenis industri ini yang digolongkan sebagai UKM dan hingga tahun 2001 mencapai 263 unit dari total 289 perusahaan, mendukung sektor industri pada umumnya.

Keadaan sosial ekonomi yang ditampilkan dalam profil ini adalah tingkat pendidikan penduduk, proporsi penduduk yang bekerja, rasio beban tanggungan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, serta pertumbuhan ekonomi. Penduduk Usia Produktif (15 – 64 Tahun) menurut BPS Kota Tebing Tinggi 2008, di kota Tebing Tinggi mencapai 91.203 Orang (65.42 %), sementara penduduk usia non produktif (0 – 4 Tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 48.206 Orang (34.68 %). Penduduk usia 15 – 64 tahun sebanyak 91.203 jiwa tersebut, 51.200 Orang (56.14 %) diantaranya merupakan angkatan kerja dan sisanya 40.003 Orang (43.86 %) bukan angkatan kerja dalam arti penduduk masih bersekolah, mengurus rumah tangga. Dari seluruh angkatan kerja, jumlah yang bekerja ada sebanyak 45.230 orang (88,33 %), sedangkan yang mencari pekerjaan sebanyak 5.970 orang (11.67 %).

Ada tiga komoditi pertanian utama yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu sawit, kelapa dan karet. Ketiga komoditi ini merupakan bahan baku industri hasil pertanian yang sangat baik jika dilihat dari potensi pasarnya. Dengan melihat fungsi Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan rakyat, maka wajar bila salah satu usahanya adalah membangun pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal ini tentunya didukung oleh kenyataan bahwa konsumsi CPO dalam negeri dan dunia terus meningkat. Arang batok kelapa yang diolah menjadi arang briket merupakan bahan bakar alternatif. Arang briket merupakan produk yang pemanfaatannya sudah dikenal luas baik di lingkungan rumah tangga maupun industri. Dalam rumah tangga, arang briket pada umumnya digunakan sebagai bahan bakar, terutama untuk pemanggangan sate, ikan dan lain-lain, sedangkan dalam industri, produk ini merupakan bahan baku bagi industri karbon aktif dan kertas karbon, atau dapat juga digunakan sebagai bahan pembantu dalam proses pengecoran baja dan timah.

Selain sebagai pusat kegiatan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan rakyat, Kota Tebing Tinggi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa ekonomi, dalam hal ini sebagai terminal dan pendistribusian wilayah hinterland dari Kota Tebing Tinggi sendiri. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka pembangunan kawasan pusat bisnis terpadu mutlak diperlukan dengan tujuan mengundang lebih banyak investor dan pelaku bisnis menanamkan investasinya di kota ini. Kawasan pusat bisnis yang dibangun diharapkan memiliki fasilitas yang lengkap demi kelancaran berusaha para investor.

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tebing Tinggi ditujukan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, merata, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu lingkungan permukiman dan perbaikan status gizi masyarakat diharapkan dapat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik.

Tabel 7

Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Uraian Fasilitas	2008	2009	2010
Rumah Sakit	7	5	5
Puskesmas	9	9	9
Puskesmas pembantu	14	14	14
Puskesmas Keling	7	7	7
Dokter Umum	18	51	23
Bidan	3	52	51
Balai Pengobatan Umum	3	5	6
Posyandu	125	125	125
Polindes	-	35	35
Skm	6	5	16
Ahli Gizi	16	22	21
Akper	17	749	650
Dokter Gigi	8	18	12

Sektor Perbankan Untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kota Tebing Tinggi, keberadaan lembaga keuangan, khususnya lembaga-lembaga perbankan, sangat diperlukan. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai mediator dengan kreditur, mendukung ketersediaan modal kerja dan lain sebagainya. Saat ini Kota Tebing Tinggi sedikitnya ada 13 Bank yang beroperasi : Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank BRI, Bank BCA, Bank Danamon, Panin Bank, Bank Syariah Mandiri, Bank Mestika Darma, Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat. Posisi dana simpanan pada perbankan di Kota Tebing Tinggi pada akhir tahun 2006 mencapai 1,44 Trilyun Rupiah. Jumlah ini naik sekitar 20,39% pada akhir tahun 2005 yang berada pada tingkat 1,24 trilyun rupiah.

Peningkatan juga terjadi pada kredit yang disalurkan berada pada posisi 532 Milyar rupiah, atau naik sekitar 21,79% dari posisi akhir tahun 2005. Sementara itu, presentasi penyaluran kredit terhadap dana simpanan pada posisi akhir tahun 2006 sebesar 36,94% keadaan ini

lebih baik dari posisi akhir pada tahun 2004 yang sebesar 37,9%. Dana simpanan pada perbankan di Kota Tebing Tinggi utamanya berupa simpanan berjangka (42,35%) dan tabungan(39,37%) sedangkan sisanya dalam bentuk giro. Pada sisi lain, kredit yang disalurkan oleh perbankan di Kota Tebing Tinggi umumnya untuk keperluan modal kerja (62,38%) dan konsumsi (30,31%) sedangkan yang digunakan sebagai investasi hanya 7,31%.

Dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Tebing Tinggi melalui perencanaan dari bawah (masyarakat) dan perencanaan dari atas (pemerintah kabupaten Serdang Bedagai). Untuk itu ada beberapa factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan serta permasalahan strategis yang didasarkan pada factor-faktor kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

- Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai sumber daya alam yang sangat besar khususnya dibidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkebunan Negara yakni PTPN III Rambutan, PTPN IV Pabatu, PTPN III Gunung Pamela dan perkebunan swasta diantaranya PKS Rambutan, PT. NPK Bahilang, PT. LONSUM Sibulan Estate, PT. PD Paya Pinang, PT. SCOFINDO dan perusahaan swasta lainnya serta perkebunan rakyat. Keberadaan perusahaan perkebunan yang ada di kecamatan Tebing Tinggi sangat mendukung pelaksanaan pembangunan terutama dalam penyediaan lapangan kerja.
- Keterbukaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan keinginan untuk memajukan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari tinggi swadaya masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Selain hal tersebut sebagai daerah pertanian dan perkebunan, masyarakat petani coklat ataupun sawit yang ada di kecamatan Tebing Tinggi telah membentuk suatu wadah/organisasi petani coklat dengan kerjasama antara pemerintah kecamatan tebing tinggi dengan dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten Serdang Bedagai. Organisasi ini terbentuk atas keinginan masyarakat petani coklat dan memungkinkan untuk mendirikan koperasi petani coklat yang akan memudahkan masyarakat dalam pengadaan pupuk,

bibit maupun pemasaran coklat dimaksud. Disamping hal tersebut sangat diharapkan bantuan pemerintah dalam kestabilan harga gabah maupun pupuk bagi petani sawah yang tergabung dalam wadah HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

- Kemajemukan masyarakat kecamatan Tebing Tinggi baik dalam suku, agama maupun tingkat pendidikan mendukung dari pelaksanaan pembangunan. Kemajemukan masyarakat dimaksud tidak menjadikan masyarakat kecamatan tebing tinggi menjadi terkotak-kotak tetapi saling menjaga keharmonisan dan kerjasama untuk kemajuan kecamatan tebing tinggi.

Sedangkan kelemahan pemerintah Kotamadya Tebing Tinggi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Tapal batas wilayah antara kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kota Tebing Tinggi yang tidak jelas. Hal ini dapat dilihat mulai memasuki wilayah kecamatan Tebing Tinggi yakni tugu/pintu masuk kota Tebing Tinggi yang dibangun pemko Tebing Tinggi masih merupakan wilayah kecamatan Tebing Tinggi. Kemudian perbatasan antara desa Paya Pinang kecamatan Tebing Tinggi dengan kota Tebing Tinggi dimana pengaspalan yang dilakukan pihak pemko Tebing Tinggi sudah memasuki jalan desa Paya Pinang kecamatan Tebing Tinggi. Kami sebagai pihak kecamatan Tebing Tinggi melihat ada indikasi pihak pemko Tebing Tinggi mengambil wilayah kabupaten Serdang Bedagai tanpa izin karena tapal batas tidak jelas.
- Pada bidang pendidikan ada beberapa bangunan sekolah dasar yang perlu perbaikan segera. Serta usulan pengadaan mobiler sekolah dasar kecamatan tebingtinggi. Untuk bidang pendidikan, juga perlu kami sampaikan disini, di desa Kedai Damar kecamatan Tebing Tinggi terdapat bangunan SMUN milik pemko Tebing Tinggi yang berada di wilayah kecamatan Tebing Tinggi. Dalam penerimaan murid dibuat perbedaan oleh pihak sekolah, dimana diluar pemko Tebing Tinggi hanya 20% diterima. Padahal nilai rata-rata dari luar pemko Tebing Tinggi lebih tinggi daripada nilai rata-rata murid yang diterima yang berasal dari pemko Tebing Tinggi.

Sehingga murid dari luar pemko Tebing Tinggi (dari kecamatan Tebing Tinggi) yang tidak diterima, mendaftar ke sekolah swasta.

Peluang yang dimiliki Pemerintah Kotamadya Tebing Tinggi terkait dengan pengembangan Pemko Tebing Tinggi adalah:

- Sumber daya alam terutama didalam bidang pertanian dan perkebunan merupakan salah satu potensi yang dapat menarik investor (regional dan global) untuk menanamkan investasinya di kecamatan Tebing Tinggi.
- Sumber daya manusia yang besar dilihat dari jumlah penduduk yang ada sangat mendukung untuk pembangunan jika dapat diberikan pelatihan maupun ketrampilan sehingga dapat diberdayakan sebagai penggerak dan pelaksana dari pelaksanaan pembangunan,

Adapun ancaman yang diduga akan mengganggu perekonomian Pemko Tebing Tinggi adalah:

- Keterbatasan bantuan dana dari APBD kabupaten Serdang Bedagai sehingga tidak seluruhnya keinginan dari masyarakat dapat diakomodir.
- Belum terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas termasuk didalamnya aparatur pemerintah yang ada di kecamatan Tebing Tinggi sehingga perlu dilakukan pemberdayaan aparatur pemerintah sehingga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan globalisasi terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada public
- Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan masih tingginya jumlah pengangguran yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

B. Hasil Penelitian, Pembahasan dan Analisa Peneliti

1. Hasil Penelitian

Rasio Gini digunakan untuk menganalisa dan mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut.

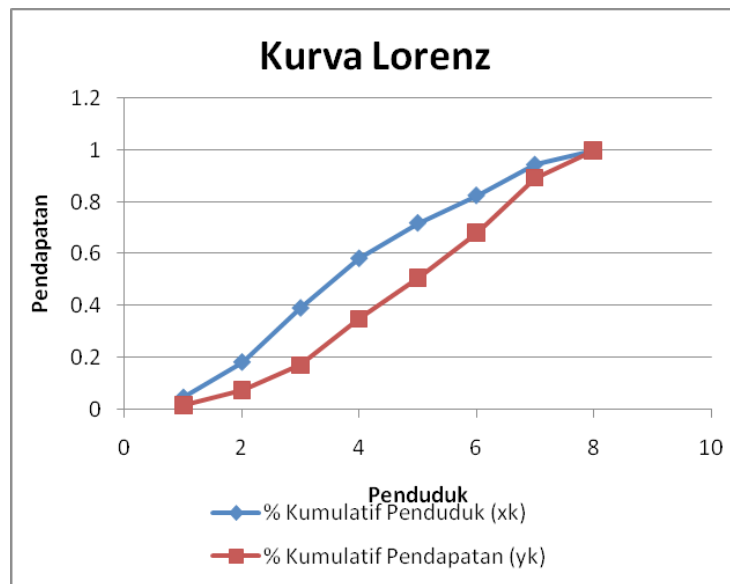
Tabel 8. Rasio Gini tahun 2008

Kelompok Pengeluaran	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Pendapatan (Rp/Kapita, Bulan)	% Kumulatif Penduduk (xk)	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan (yk)	Xk-Xk-1	Yk+Yk-1	$Xk - Xk - 1) * (Yk - Yk - 1)$
<500.000	4008	1200803	0.028734479	4812818424	0.013002169	0.028734479	0.013002169	0.000581899
500.000 - 649.999	11451	1592588	0.110829916	18236725188	0.062269971	0.082095437	0.07527214	0.006179499
650.000 - 799.999	11008	1656679	0.189749362	18236722432	0.111537766	0.078919446	0.173807737	0.01371681
800.000 - 899.999	27129	1722242	0.384244788	46722703218	0.237762451	0.194495426	0.349300216	0.067937294
900.000 - 999.999	26761	2407312	0.576101918	64422076432	0.411803243	0.191857131	0.649565694	0.12462381
1.000.000 - 1.099.999	30714	2571901	0.796299217	78993367314	0.625209408	0.220197299	1.037012652	0.228347385
1.100.000 - 1.199.999	15974	4547971	0.910821313	72649288754	0.821476597	0.114522096	1.446686005	0.165677513
1.200.000 - 1.299.999	8761	5154042	0.973631384	45154561962	0.943464837	0.062810071	1.764941434	0.110856097
1.300.000 - 1.399.999	3678	5689716	1	20926775448	1	0.026368616	1.943464837	0.051246478
Seluruh Penduduk	139484			370155039172				0.769166786
G1								0.230833214

Sumber: BPS, Diolah

Pada tahun 2008 ketimpangan yang terjadi di Tebing Tinggi menunjukkan ketimpangan rendah pada titik 0.230833214. Itu berarti pendapatan pada masyarakat tidak merata dan terlihat jelas ketidakmerataannya pada gambar kurva Lorenz. Dimana titik pendapatan dan jumlah penduduk bertemu pada titik 1 tetapi garis kurva tidak cembung dikarenakan tidak meratanya pendapatan. Maka ketimpangan yang terjadi pada tahun 2008 termasuk ketimpangan cukup rendah.

Gambar 5. Kurva Lorenz 2008



Sedangkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Tebing Tinggi disajikan dalam table berikut:

Tabel 9. Ketimpangan antar Kecamatan tahun 2008

Kecama-tan	Kelurah-an	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata (Rp)	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan (Rp)	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta X(k= Xk_2-Xk_1)$	$\Delta Y(k= Yk_2+Yk_1)$	$(Xk_2-Xk_1) * (Yk_2+Yk_1)$
Padang Hulu	Pabatu	1889	4,317,115	0.0769	8,155,030,235	0.0606	0.0769	0.0606	0.0047
	Lubuk Baru	1764	3,590,599	0.1487	6,333,816,636	0.1077	0.0718	0.1684	0.0121
	Persiakan	5702	4,854,128	0.3808	27,678,237,856	0.3135	0.2321	0.4213	0.0978
	Bandar Sono	4161	11,500,680	0.5502	47,854,329,480	0.6693	0.1694	0.9829	0.1665
	Tualang	4784	3,415,827	0.745	16,341,316,368	0.7908	0.1948	1.1044	0.2151
	Lubuk Raya	4034	4,334,063	0.9092	17,483,610,142	0.9208	0.1642	1.7117	0.2811
	Padang Merbau	2230	4,774,922	1	10,648,076,060	1	0.0908	1.9208	0.1744
	Jumlah	24564	36,787,334		134,494,416,777				0.5225

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata (Rp)	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan (Rp)	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
Padang Hilir	Bagelen	3691	4,061,136	0.133	14,989,652,976	0.074	0.133	0.074	0.0098
	Tebing Tinggi	5433	9,100,327	0.3289	49,442,076,591	0.318	0.1958	0.3919	0.0768
	Tambangan	2246	7,369,743	0.4098	16,552,442,778	0.3997	0.081	0.7176	0.0581
	Satria	5236	4,619,176	0.5985	76,546,005,536	0.7774	0.1887	1.1771	0.2221
	Deblod sundoro	4513	3,429,277	0.7612	15,476,327,101	0.8538	0.1627	1.6312	0.2653
	Damar Sari	4285	2,968,752	0.9157	12,721,102,320	0.9166	0.1544	1.694	0.2616
	Tambangan Hulu	2340	7,224,027	1	16,904,223,180	1	0.0843	1.9166	0.1616
Jumlah		27744	48,772,438		202,631,830,482				0.7121
									0.2879

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan-an X	Perubah-anY	Jumlah Akumulasi
Tebing Tinggi Kota	Mandailing	3805	3,714,214	0.1263	14,132,584,270	0.0493	0.1259	0.048	0.006
	Pasar Gambir	3907	14,173,370	0.2559	55,375,356,590	0.2424	0.1296	0.2917	0.0378
	Rambung	5533	8,224,214	0.4395	45,504,576,062	0.4011	0.1836	0.6435	0.1181
	Tebing Tinggi Lama	3121	12,804,037	0.543	39,961,399,477	0.5405	0.1036	0.9416	0.0975
	Pasar Baru	3429	9,728,500	0.6568	33,359,026,500	0.6568	0.1138	1.1973	0.1362
	Badak Bejuang	4285	14,161,107	0.799	60,680,343,495	0.8685	0.1422	1.5253	0.2169
	Bandar Utama	6058	6,225,408	1	37,713,521,664	1	0.201	1.8685	0.3756
Jumlah		30138	69,030,850		286,726,808,058				0.6112
									0.3888

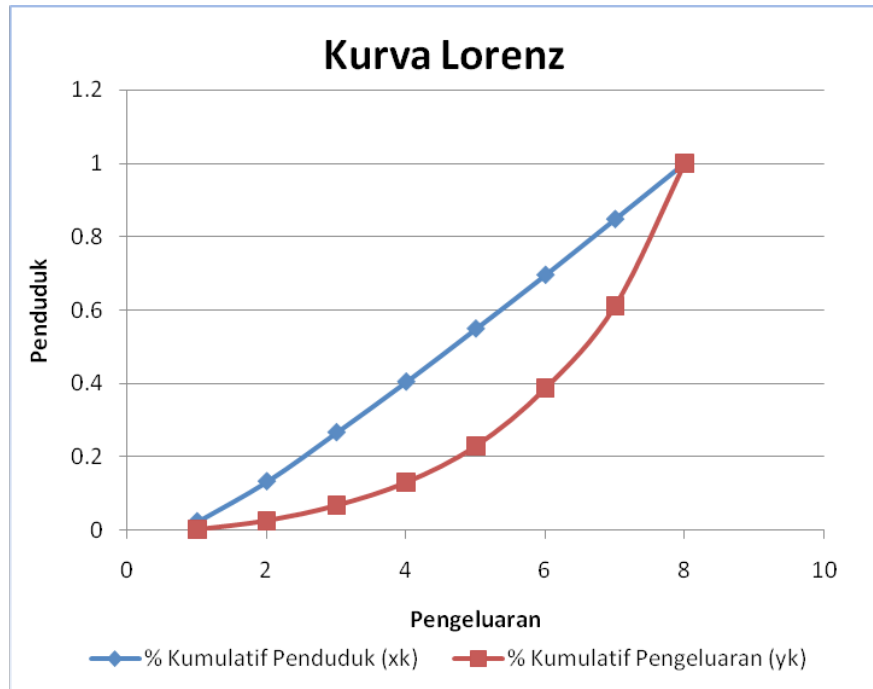
Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
Bajenis	Bulian	4749	7,951,603	0.155	37,762,162,647	0.1945	0.155	0.194	0.0301
	Pelita	2681	2,081,850	0.2425	5,581,439,850	0.2233	0.0875	0.4178	0.0366
	Durian	7765	5,753,860	0.4959	44,678,722,900	0.4534	0.2534	0.6766	0.1715
	Bandar Sakti	5290	5,780,455	0.6685	30,578,606,950	0.6109	0.1726	1.0643	0.1837
	Teluk Karang	2168	2,750,314	0.7393	5,962,680,752	0.6416	0.0708	1.2525	0.0886
	Pinang mancung	2721	4,514,633	0.8281	12,284,316,393	0.7049	0.0888	1.3465	0.1196
	Berhol	5267	10,878,560	1	57,297,375,520	1	0.1719	1.7049	0.2931
	Jumlah	30641	39,711,275		194,145,305,012				0.6331
Ketimpangan									
									0.3669

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelurah-an	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi	
Rambut-an	Rantau Laban	2606	2,830,668	0.0932	7,376,720,808	0.0273	0.0932	0.0273	0.0025	
	Sri Padang	4781	28,351,041	0.2641	135,546,327,021	0.5298	0.1709	0.5571	0.0952	
	Kanya Jaya	4441	6,501,887	0.4228	28,874,880,167	0.6368	0.1588	1.1666	0.1852	
	Lalang	4749	5,858,001	0.5926	27,819,646,749	0.7399	0.1698	1.3767	0.2337	
	Tanjung marulak	3632	7,725,399	0.7224	28,058,649,168	0.8439	0.1298	1.5838	0.2056	
	Tanjung Manulak Hilir	4379	5,800,793	0.879	25,401,672,547	0.9381	0.1565	1.782	0.279	
	Mekar Sentosa	3386	4,933,276	1	16,704,072,536	1	0.121	1.9381	0.2346	
			27974	269,781,968,996					0.6887	
					Gini					0.3113

Sedangkan pada tahun 2009 ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Tebing Tinggi mengalami ketimpangan yang sedang (normal). Dimana titik rasio gini menunjukkan angka 0.300833722 dan kurva Lorenz pun cenderung mengalami garis pemerataan ideal. Seperti terlihat jelas pada tabel dan gambar di bawah ini :



Gambar 6. Kurva Lorenz 2009

Gini 2009

Kelompok Pengeluaran	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Pendapatan Perkapita	% Kumulatif Penduduk (xk)	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan (yk)	Xk-Xk-1	Yk+Yk-1	Xk - Xk - 1)* (Yk - Yk - 1)
<500.000	7005	1069220	0.048789831	7489886100	0.016822913	0.048789831	0.016822913	0.000820787
500.000 - 649.999	19541	1365430	0.184892913	26681867630	0.076752628	0.136103082	0.093575541	0.01273592
650.000 - 799.999	29908	1418671	0.393202159	42429612268	0.1720531	0.208309246	0.248805728	0.051828534
800.000 - 899.999	27457	2899712	0.584440188	79617392384	0.350880449	0.191238029	0.522933549	0.100004781
900.000 - 999.999	19554	3569814	0.720633815	69804142956	0.507666415	0.136193627	0.858546864	0.116928611
1.000.000 - 1.099.999	15211	5090167	0.826578443	77426530237	0.681572903	0.105944628	1.189239319	0.125993518
1.100.000 - 1.199.999	17008	5578045	0.945039178	94871389360	0.89466201	0.118460735	1.576234914	0.186721946
1.200.000 - 1.299.999	7891	5943291	1	46898509281	1	0.054960822	1.89466201	0.104132181
Seluruh Penduduk	143575			445219330216				0.699166278
G1								
								0.300833722

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelura-han	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta X = \frac{Xk_2 - Xk_1}{Xk_2 + Xk_1}$	$\Delta Y = \frac{Yk_2 - Yk_1}{Yk_2 + Yk_1}$	$\frac{(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)}{(Yk_2 + Yk_1)}$
Padang Hulu	Pabatu	1911	5,622,292	0.0769	10,744,200,012	0.0677	0.0769	0.0677	0.0052
	Lubuk Baru	1785	4,060,685	0.1487	7,248,322,725	0.1134	0.0718	0.181	0.013
	Persiakan	5769	5,502,102	0.3808	31,741,626,438	0.3133	0.2321	0.4267	0.099
	Bandar Sono	4210	13,823,268	0.5502	58,195,958,280	0.68	0.1694	0.9933	0.1683
	Tualang	4841	3,530,096	0.745	17,089,194,736	0.7876	0.1948	1.4676	0.2859
	Lubuk Raya	4081	5,131,617	0.9092	20,942,128,977	0.9195	0.1642	1.7072	0.2803
	Padang Merbau	2256	5,660,835	1	12,770,843,760	1	0.0908	1.9195	0.1742
Jumlah		24853	43,330,895		158,732,274,928				0.7445

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Padang Hilir	Bagelen	3735	5,757,549	0.1331	21,504,445,515	0.0899	0.1331	0.0899	0.012
	Tebing Tinggi	5496	10,000,000	0.3289	54,960,000,000	0.3197	0.1958	0.4096	0.0802
	Tambangan	2272	7,062,523	0.4098	16,046,052,256	0.3867	0.0809	0.7064	0.0572
	Satria	5297	16,768,732	0.5985	88,823,973,404	0.7581	0.1887	1.1448	0.216
	Deblod sundoro	4565	4,393,827	0.7612	20,057,820,255	0.8419	0.1626	1.6	0.2602
	Damar Sari	4337	4,209,260	0.9157	18,255,560,620	0.9182	0.1545	1.7602	0.272
	Tambangan Hulu	2367	8,262,103	1	19,556,397,801	1	0.0843	1.9182	0.1618
	Jumlah	28069	56,453,994		239,204,249,851				0.6623

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = Xk_2 - Xk_1$	$\Delta Yk = Yk_2 + Yk_1$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$
Tebing Tinggi Kota	Mandailing	3848	4,230,493	0.1259	16,278,937,064	0.048	0.1259	0.048	0.006
	Pasar Gambir	3953	16,584,940	0.2553	65,560,267,820	0.2411	0.1294	0.2891	0.0374
	Rambung	5598	10,788,783	0.4385	60,395,607,234	0.4191	0.1832	0.6603	0.121
	Tebing Tinggi Lama	3158	14,212,504	0.5419	44,883,087,632	0.5514	0.1034	0.9705	0.1003
	Pasar Baru	3469	8,743,858	0.6555	30,332,443,402	0.6407	0.1135	1.1921	0.1354
	Badak Bejuang	4335	17,042,541	0.7973	73,879,415,235	0.8584	0.1419	1.4992	0.2127
	Bandar Utama	6192	7,759,059	1	48,044,093,328	1	0.2027	1.8584	0.3766
Jumlah		30553	79,362,178		339,373,851,715				0.6451
									0.3549

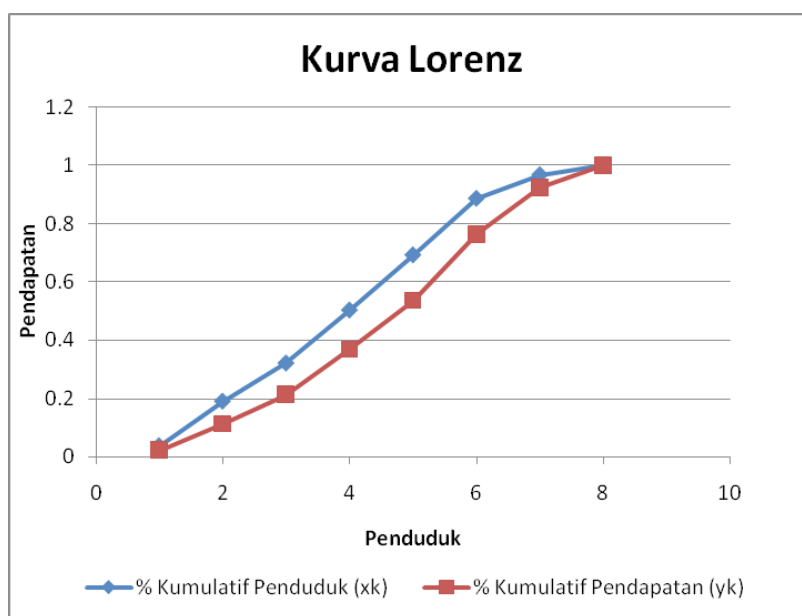
Bajenis	Bulian	4805	8,691,593	0.155	41,763,104,365	0.1734	0.155	0.1734	0.0269
	Pelita	2713	2,717,750	0.2425	7,373,255,750	0.204	0.0875	0.3774	0.033
	Durian	7856	7,896,581	0.4959	62,035,540,336	0.4615	0.2534	0.6655	0.1687
	Bandar Sakti	5352	5,537,016	0.6686	29,634,109,632	0.5846	0.1726	1.0461	0.1806
	Teluk Karang	2194	2,364,458	0.7393	5,187,620,852	0.6061	0.0708	1.1907	0.0843
	Pinang mancung	2753	5,690,563	0.8281	15,666,119,939	0.6712	0.0888	1.2773	0.1134
	Berohol	5328	14,866,512	1	79,208,775,936	1	0.1719	1.6712	0.2872
	Jumlah	31001	47,764,473		240,868,526,810				0.6701

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecama-tan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = Xk_2 - Xk_1$	$\Delta Yk = Yk_2 + Yk_1$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$
Rambut-an	Rantau Laban	2652	2.650,195	0.1	7.028,317,140	0.0261	0.1	0.0261	0.0026
	Sri Padang	4831	31,204,511	0.2821	150,748,992,641	0.5859	0.1821	0.612	0.1115
	Karya Jaya	4487	6,654,639	0.4512	29,859,365,193	0.6968	0.1691	1.2827	0.217
	Lalang	4798	5.668,608	0.6321	27,197,981,184	0.7978	0.1809	1.4946	0.2703
	Tanjung marulak	3675	7,398,044	0.7321	19,619,612,688	0.8707	0.1	1.6685	0.1668
	Tanjung Marulak Hilir	4425	5,740,410	0.8706	21,096,006,750	0.949	0.1385	1.8197	0.2521
	Mekar Sentosa	3432	4,001,866	1	13,734,404,112	1	0.1294	1.949	0.2522
	Jumlah	28300	63,318,273		269,284,679,708				0.6502

Pada tahun 2010 angka gini mengalami penurunan yaitu jatuh pada titik 0.207777536 itu berarti titik ketimpangan yang terjadi termasuk ketimpangan rendah dan kurva Lorenz juga tidak mengalami pemerataan. Seperti dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Gambar 7. Kurva Lorenz tahun 2010



Tabel 10. Rasio Gini Tahun 2010

Kelompok Pengeluaran-an	Jumlah Pendu-duk	Rata-Rata Pendapatan (Rp. Kapita.Bulan)	% Kumulatif Penduduk (xk)	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan (Yk)	Xk-Xk-1	Yk+Yk-1	(Xk - Xk - 1) (Yk - Yk - 1)
<500.000	5244	1530738	0.036101282	8027190072	0.021101876	0.036101282	0.021101876	0.000761805
500.000 - 649.999	22241	1549876	0.189215052	34470792116	0.11171869	0.15311377	0.132820566	0.020336658
650.000 - 799.999	19008	2023058	0.320071872	38454286464	0.212807313	0.13085682	0.324526002	0.042466441
800.000 - 899.999	26457	2222092	0.502209861	58789888044	0.367354162	0.182137989	0.580161475	0.105669444
900.000 - 999.999	27554	2313257	0.69189993	63739483378	0.534912508	0.189690069	0.90226667	0.171151027
1.000.000 - 1.099.999	28211	3068001	0.886112985	86551376211	0.762438753	0.194213055	1.297351261	0.251962552
1.100.000 - 1.199.999	11765	5222938	0.967106803	61447865570	0.923972894	0.080993818	1.686411647	0.136588918
1.200.000 - 1.299.999	4778	6052918	1	28920842204	1	0.032893197	1.923972894	0.063285619
Seluruh Penduduk	145258			380401724059				0.792222464
G1								
0.207777536								

Sumber: BPS, Data Diolah

Tabel 11. Ketimpangan antar kecamatan di wilayah Tebing Tinggi tahun 2010

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = Xk_2 - Xk_1$	$\Delta Yk = Yk_2 + Yk_1$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$
Padang Hulu	Pabatu	2203	5,163,542	0.0825	11,375,283,026	0.0494	0.0825	0.0494	0.0041
	Lubuk Baru	1948	5,444,459	0.1554	10,605,806,132	0.0954	0.0729	0.1447	0.0106
	Persiakan	5739	9,124,301	0.3702	52,364,363,439	0.3226	0.2148	0.418	0.0898
	Bandar Sono	4507	18,148,310	0.5389	81,794,433,170	0.6775	0.1687	1.0001	0.1687
	Tualang	5327	5,441,329	0.7383	28,985,959,583	0.8033	0.1994	1.4808	0.2953
	Lubuk Raya	4000	6,812,352	0.8881	27,249,408,000	0.9215	0.1497	1.7248	0.2583
	Padang Merbau	2990	6,047,932	1	18,083,316,680	1	0.1119	1.9215	0.2151
	Jumlah	26714	56,182,225		230,458,570,030				0.7231
									0.2772

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = Xk_2 - Xk_1$	$\Delta Yk = Yk_2 + Yk_1$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$
Padang Hilir	Bagelen	4254	5,760,000	0.1416	24,503,040,000	0.0971	0.1416	0.0971	0.0137
	Tebing Tinggi	6261	10,000,000	0.3499	62,610,000,000	0.3451	0.2083	0.4422	0.0921
	Tambanga	2654	7,060,000	0.4382	18,737,240,000	0.4194	0.0883	0.7645	0.0675
	Satria	4990	16,770,000	0.6043	83,682,300,000	0.7509	0.1661	1.1702	0.1943
	Deblod sundoro	4592	4,390,000	0.7571	20,158,880,000	0.8307	0.1528	1.5816	0.2417
	Damar Sari	4340	4,210,000	0.9015	18,271,400,000	0.9031	0.1444	1.7339	0.2504
	Tambangan Hulu	2960	8,260,000	1	24,449,600,000	1	0.0985	1.9031	0.1875
Jumlah		30051	56,450,000		252,412,460,000				0.6127

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = Xk_2 - Xk_1$	$\Delta Yk = Yk_2 + Yk_1$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$
Tebing Tinggi Kota	Mandailing	2989	5,832,748	0.1243	17,434,083,772	0.0502	0.1243	0.0502	0.0062
	Pasar Gambir	2966	19,213,312	0.2477	56,986,683,392	0.2144	0.1234	0.2646	0.0326
	Rambung	5430	14,000,000	0.4736	76,020,000,000	0.4334	0.2259	0.6478	0.1463
	Tebing Tinggi Lama	2441	18,260,350	0.5751	44,573,514,350	0.5618	0.1015	0.9952	0.1011
	Pasar Baru	2102	10,536,889	0.6626	22,148,540,678	0.6256	0.0874	1.1875	0.1038
	Badak Bejuang	3003	22,519,757	0.7875	67,626,830,271	0.8205	0.1249	1.4461	0.1806
	Bandar Utama	5109	12,197,174	1	62,315,361,966	1	0.2125	1.8205	0.3869
Jumlah		24040	102,560,230		347,105,014,429				0.3944

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi
		X							
Bajenis	Bulian	5765	12,938,180	0.174	74,588,607,700	0.2388	0.174	0.2388	0.0415
	Pelita	2562	3,057,306	0.2513	7,832,817,972	0.2639	0.0773	0.5026	0.0389
	Durian	7315	9,352,949	0.4721	68,416,821,935	0.4829	0.2208	0.7467	0.1649
	Bandar Sakti	5084	8,000,000	0.6255	40,672,000,000	0.6131	0.1534	1.096	0.1682
	Teluk Karang	2401	2,843,751	0.698	6,827,846,151	0.635	0.0725	1.248	0.0904
	Pinang mancung	4180	6,285,000	0.8241	26,271,300,000	0.7191	0.1262	1.354	0.1708
	Berohol	5827	15,060,672	1	87,758,535,744	1	0.1759	1.7191	0.3023
Jumlah		33134	57,537,858		312,367,929,502				0.3777

Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pendapatan Rata-rata	% Kumulatif Penduduk	Jumlah Pendapatan	% Kumulatif Pendapatan	Perubahan X	Perubahan Y	Jumlah Akumulasi	
		X		Xk	Y	Yk	$\Delta Xk = \frac{Xk_2 - Xk_1}{Xk_2 + Xk_1}$	$\Delta Yk = \frac{Yk_2 - Yk_1}{Yk_2 + Yk_1}$	$(Xk_2 - Xk_1) * (Yk_2 + Yk_1)$	
Rambut-an	Rantau Laban	2843	4,615,796	0.0906	13,122,708,028	0.0343	0.0906	0.0343	0.0031	
	Sri Padang	4166	32,635,785	0.2234	135,960,680,310	0.3894	0.1328	0.4236	0.0563	
	Karya Jaya	5793	9,884,840	0.4081	57,262,878,120	0.5389	0.1847	0.9283	0.1714	
	Lalang	5073	8,845,358	0.5698	44,872,501,134	0.6561	0.1617	1.1951	0.1933	
	Tanjung marulak	5185	9,785,115	0.7351	50,735,821,275	0.7886	0.1653	1.4448	0.2388	
	Tanjung Marulak Hilir	4400	13,019,259	0.8753	57,284,739,600	0.9383	0.1403	1.7269	0.2422	
	Mekar Sentosa	3911	6,044,934	1	23,641,736,874	1	0.1247	1.9383	0.2416	
	Jumlah	31371	84,831,087		382,881,065,341				0.6442	
										0.3558

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2008 ketimpangan yang terjadi di Tebing Tinggi menunjukkan ketimpangan rendah pada titik 0.23. Pada tahun 2009 ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Tebing Tinggi mengalami ketimpangan yang sedang (normal). Dimana titik rasio gini menunjukkan angka 0.300833722 dan kurva Lorenz pun cenderung mengalami garis pemerataan ideal. Pada tahun 2010 angka gini mengalami penurunan yaitu jatuh pada titik 0.207777536 itu berarti titik ketimpangan yang terjadi termasuk ketimpangan rendah dan kurva Lorenz juga tidak mengalami pemerataan.

Rendahnya ketimpangan pendapatan antar wilayah di Tebing Tinggi tentu sebuah hal yang harus terus menerus dikembangkan. Adalah kenyataan bahwa di Indonesia ketimpangan antar wilayah cukup besar. Hal ini dipicu oleh beberapa hal seperti perbedaan potensi daerah yang berbeda, perbedaan kondisi demografis, dan ketenagakerjaan, perbedaan kondisi social dan budaya maupun kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar wilayah. Bila ketimpangan ini ekonomi ini karena tidak meratanya distribusi pendapatan antar wilayah tersebut cukup besar, maka akan membawa dampak negative baik dari sisi ekonomi, social dan politik. Ketimpangan antar wilayah akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran). Sedangkan dari sisi social, ketimpangan distribusi pendapatan akan memicu terjadinya kecemburuan dan keresahan social. Bahkan kondisi tersebut selanjutnya dapat pula mempunyai implikasi politik yang mendorong timbulnya keinginan masyarakat dan organisasi untuk melakukan pemekaran wilayah.⁵⁴

⁵⁴ Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 192

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pada tahun 2008 ketimpangan yang terjadi di Tebing Tinggi menunjukkan ketimpangan rendah pada titik 0.230833214. Itu berarti pendapatan pada masyarakat tidak merata dan terlihat jelas ketidakmerataannya pada gambar kurva Lorenz. Dimana titik pendapatan dan jumlah penduduk bertemu pada titik 1 tetapi garis kurva tidak cembung dikarenakan tidak meratanya pendapatan. Ketimpangan yang terjadi pada tahun 2008 ini termasuk pada ketimpangan cukup rendah. Sedangkan pada tahun 2009, ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Tebing Tinggi mengalami ketimpangan yang sedang (normal). Hal ini terlihat pada titik rasio gini yang menunjukkan angka 0.300833722 dan kurva Lorenz pun cenderung mengalami garis pemerataan ideal. Pada tahun 2010, angka gini mengalami penurunan, yaitu jatuh pada titik 0.207777536 itu berarti titik ketimpangan yang terjadi termasuk ketimpangan rendah dan kurva Lorenz juga tidak mengalami pemerataan.

B. SARAN

Disarankan kepada pemerintahan Kota Tebing Tinggi untuk mendistribusikan pendapatan secara proporsional antar kecamatan yang ada di Tebing Tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah yang dapat memicu

kecemburuan sosial. Apabila pendapatan didistribusikan secara proporsional, maka kesejahteraan masyarakat tidak mengalami ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2006)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Erni Umi Hasanah, Dadang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:CAPS, 2012)
- Food And Agriculture Organization Of The United Nations. *The State of Food Insecurity in the World: Addressing Food Insecurity in Protracted Crises*, Rome 2010
- <http://DistribusiPendapatanMasyarakat.com>
- <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/12/12/13/i>
- <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-inequality-in-indonesia>
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-BariSharh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Mu`arrafah, t.th.), vol. V
- Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: an Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal (United Kingdom: Princeton University Press, 1967)
- Iskandar Putong: *Economics* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)
- lihat Ahmad Erani Yustika. *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2012)

- Lihat criteria ini dalam sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=21
- M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- M. Umer Chapra. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, *Masa depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001),
- M.L. Jhingan. *The Economics of Development and Planning*. Terj. D. Guritno. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 1998)
- Mudrajad Kuncoro. *Mengurangi Kemiskinan*. <http://publications.feb.ugm.ac.id/node/30>
- Muh Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an islamic Economi*, (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986)
- Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006)
- N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Jilid 2*, (Jakarta:Erlangga, 2000)
- N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* ,(Jakarta:Erlangga)
- N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*. Edisi keempat, (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Nas,d. P.J.M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar sosiologi Kota*. Jilid I. Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Nurul Huda, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 6
- Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2015)

- Oxfam. *Working For The Few Political Capture and Economic Inequality* dalam <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-en.pdf>
- Priyonggo Suseno. Peranan Zakat dalam Transformasi Ekonomi. <http://lasisuii.org/>
- S Dalimunthe. *Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Tebing Tinggi* dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18232/5/Chapter%20I.pdf
- Sadono Sukirno. *Ekonomi Makro* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- SadonoSukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2000),
- Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.151
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- UNDP, *Human Development Report, 2014*. dapat diunduh di <http://www.mr.undp.org>
- Wikipedia Indonesia. *Kota Tebing Tinggi.com*
- Wikipedia.org
- World bank, *Global Development finance, 1998* (Washington,D,c: World Bank,1998)

Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*.
(Jakarta: Erlangga, 2009)

Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*.
(Jakarta: Erlangga, 2009)